

## LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL

# EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH PRO-POOR GROWTH: KLUSTERISASI KAWASAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Tahun pertama.

No kontrak: 1749/UN30.15/PP/2022 Tanggal 8 Juni 2022

## TIM PENELITI

No	Nama	NIDN
1	Dr.Roosemarina Anggraini Rambe, S.E., MM	0029087106
2	Ratu Eva Febriani, S.E., M.Sc	0003028401

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU 2022

#### HALAMAN PENGESAHAN

Judul

Efisiensi dan Produktivitas Belanja Pemerintah Pro-

poor Growth: Klusterisasi Kawasan Pembangunan di

Indonesia

Unit Lembaga Pengusul

: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Ketua Tim Pengusul

a. Nama Lengkap

: Dr. Roosemarina Anggraini Rambe, SE, MM

b. NIP

: 197108291997022001

c. NIDN

: 0029087106

d. Pangkat/ Golongan

: Pembina/IVa

e. Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

f. Fakultas/Jurusan

: FEB/Ekonomi Pembangunan

g. Pusat Penelitan

: -

h. Alamat Institusi

: Jl WR Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

i. Telp/ Faks/ E-mail

: 0811739374/roosemarina.rambe@unib.ac.id

Peneliti Anggota

: 1 orang

Nama NIP : Ratu Eva Febriani: 198402032008122003

NIDN

0003028401

Biaya Penelitian tahun ke1

Rp.188.100.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta

Seratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bengkulu

Dr. M. Armelly, SE., MSi

NIP. 196503251990012001

Bengkulu 28 November 2022 Ketua Tim.

( )

Dr. Roosemarina Anggraini Rambe, S.E, MM

NIP. 197108291997022001

Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Bengkulu

Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc.

NIP.196306251987031002

#### RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan saling terkait. Ada daerah yang selalu miskin walaupun pertumbuhan ekonomi positif, dan sebaliknya, ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah namun tingkat kemiskinannya juga rendah. Namun, saat pandemic Covid-19 terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif dan peningkatan kemiskinan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Melalui belanja pemerintah yang bersifat *pro-poor growth*, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Untuk itu, pengukuran efisiensi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menurunkan kemiskinan (belanja pemerintah yang bersifat *pro-poor growth*) perlu dilakukan. Selain itu, clustering pemerintah daerah berdasarkan efisiensi belanja juga perlu dilakukan untuk dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan program pemerintah yang tepat yang bersifat *pro-poor growth*. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengukur efisiensi belanja pemerintah *pro-poor growth* di setiap kawasan di Indonesia, (2) membandingkan efisiensi belanja pemerintah *pro-poor growth* di setiap kawasan di Indonesia.

Penelitian tahun pertama ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada tahun pertama, penelitian ini mengukur efisiensi belanja *pro-poor growth* pemerintah kabupaten/kota di tujuh kawasan di Indonesia. Selanjutnya dibuat klusterisasi efisiensi belanja *pro-poor growth* pemerintah selama 2014-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian terdiri dari kabupaten/kota di tujuh kawasan pada tahun 2014-2020. Metode analisis yang digunakan adalah Data envelopment Analysis dengan output oriented berdasarkan pendekatan variable return to scale. Variabel input yang digunakan terdiri dari belanja pendidikan/kapita, belanja kesehatan /kapita, belanja ekonomi/ kapita, belanja perlindungan sosial/kapita serta belanja perumahan & fasilitas umum/kapita. Variabel output penelitian terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan dari 7 wilayah di Indonesia, selama tahun 2014-2020 hanya ada tiga wilayah yang memiliki skor rata-rata efisien lebih stabil ( $E \ge 0.9$ ), yaitu sumatera, jawabali dan kalimantan. Rata-rata skor efisiensi belanja pemerintah daerah tertinggi dan paling stabil di Indonesia berada di wilayah Kalimantan. Pemerintah daerah di wilayah kalimantan menempati

peringkat pertama sebagai wilayah yang mampu mengalokasikan belanja yang bersifat *pro-poor growth* baik sebelum maupun saat pandemic Covid-19, diikuti wilayah Jawa-Bali diurutan kedua.

Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Sulawesi. Skor efisiensi rata-rata terendah untuk belanja pemerintah daerah berada di wilayah Sulawesi. Masih adanya ketimpangan dalam kemampuan pemerintah daerah yang bersifat *pro-poor growth*. Dengan strategi pemerintah yang memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya alokasi belanja dapat lebih merata antar daerah, karena beberapa hal yang terjadi saat ini seperti bencana pandemi Covid-19 membuat sinergi kebijakan pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat semestinya lebih baik lagi.

Hasil perbandigan efisiensi belanja pemerintah daerah antara sebelum dan saat pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia justru lebih efisien dalam mengalokasikan belanja untuk pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Selama pandemi Covid-19 belanja pemerintah diutamakan untuk sektor kesehatan dan ekonomi setelahnya. Akibatnya ada beberapa belanja pemerintah yang mengalami penurunan. Artinya ketika belanja berkurang pemerintah daerah mampu menghasilkan output yang lebih baik ketimbang saat sebelum terjadinya pengurangan anggaran. Kondisi ini terjadi pada empat wilayah yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sebaliknya yang terjadi di 3 wilayah lain (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

Selanjutnya berdasarkan *clustering* efisiensi, diketahui terdapat 20 pemerintah daerah yang selalu efisien selama periode penelitian di tujuh kawasan di Indonesia. Dari 20 pemerintah daerah tersebut, terdapat 12 pemerintah daerah yang selalu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak efisien di Indonesia. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah yang selalu efisien dan menjadi rujukan di tujuh kawasan seharusnya dapat mempertahankan alokasi belanja yang bersifat *pro-poor growth* agar pertumbuhan ekonominya terus meningkat dan kemiskinan dapat diturunkan. Bagi pemerintah daerah yang tidak efisien, seharusnya mereka dapat belajar ke peer masing-masing bagaimana mengalokasikan belanja yang bersifat *pro-poor growth* agar dapat meningkatkan efisiensi belanja.

Kata kunci: efisiensi belanja pemerintah, belanja pro-poor growth, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, DEA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah Nya yang telah

memberikan kesehatan dan kesempatan kepada tim peneliti sehingga laporan akhir penelitian dasar

kompetitif nasional (PDKN) DIKTI tahun pertama ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian

ini berjudul "Efisiensi dan Produktivitas Belanja Pemerintah Pro-poor Growth: Klusterisasi

Kawasan Pembangunan di Indonesia".

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi yang telah memberi kepercayaan dan dana penelitian sehingga kegiatan penelitin

PDKN ini dapat dilaksanakan sampai selesai. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih

kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu

yang telah memfasilitasi tim peneliti dalam proses usulan, pendanaan dan pelaksanaan penelitian

ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada institusi pemberi data sekunder serta pihak-pihak

lain yang membantu tim peneliti dalam proses penelitian ini.

Laporan penelitian PDKN ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami

sebagai tim peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk

penyempurnaan pemelitian selanjutnya. Akhir kata, tim peneliti berharap laporan ini dapat

bermanfaat bagi pembaca. Semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dalam upaya pembangunan ekonomi khususnya ekonomi publik dan ekonomi

keuangan daerah di Indonesia.

Bengkulu, November 2022

Ketua Peneliti

Dr. Roosemarina A, Rambe, SE., MM

Livar

iv

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR DIAGRAM	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	3
2.1. EFISIENSI	3
2.2. PRODUKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH	4
2.3. BELANJA PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI PRO-POOR GROWTH	4
2.4. DETERMINAN EFISIENSI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	5
BAB III. METODE PENELITIAN	7
3.1. DISAIN PENELITIAN	7
3.2. JENIS DAN SUMBER DATA	7
3.3. METODE ANALISIS	8
4.1. DESKRIPSI DATA PENELITIAN	10
4.2. HASIL PENGUKURAN EFISIENSI	62
4.3. PEMBAHASAN	72
V. KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. KESIMPULAN	77
5.2. SARAN	77
REFERENSI	78

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1.1.a.	Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi tahun 2014-2020	13
Tabel 4.1.1.b.	Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi tahun 2014-2020	14
Tabel 4.1.2.	Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera	16
Tabel 4.1.3.	Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera	17
Tabel 4.1.4.	Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera	18
Tabel 4.1.5.	Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera	19
Tabel 4.1.6.	Deskripsi Input Belanja Perumahan dan Failitas Umum Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera	20
Tabel 4.1.7.	Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Jawa-Bali tahun 2014-2020	23
Tabel 4.1.8.	Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali	26
Tabel 4.1.9.	Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali	27
Tabel 4.1.10.	Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali	27
Tabel 4.1.11.	Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali	28
Tabel 4.1.12.	Deskripsi Input Belanja Perumahan & Fasilitas Umum Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali	29
Tabel 4.1.13.	Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020	32

Tabel 4.1.14.	Deskripsi Input di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020	34
Tabel 4.1.15.	Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Papua tahun 2014-2020	40
Tabel 4.1.16.	Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Papua tahun 2014-2020	43
Tabel 4.1.17.	Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 2014-2020 Berdasarkan tipologinya, selama periode 3 tahun terakhir (2017-2019) tingkat ke	47
Tabel 4.1.18.	Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 2014-2020	50
Tabel 4.1.19.	Statistik Deskriptif Output Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara	54
Tabel 4.1.20.	Statistik Deskriptif Input Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara	56
Tabel 4.1.21.	Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi	58
Tabel 4.1.22.	Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi	61
Tabel 4.2.1.	Efisiensi Relatif Rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di setiap kawasan di Indonesia tahun 2014-2020.	63
Tabel 4.2.2.	Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sumatera.	65
Tabel 4.2.3.	Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Jawa-Bali	66
Tabel 4.2.4.	Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kalimantan	67
Tabel 4.2.5.	Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sulawesi	68
Tabel 4.2.6.	Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara	69
Tabel 4.2.7.	Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Maluku	71
Tabel 4.2.8.	Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Papua	72
Tabel 4.3.1.	Jumlah Pemerintah Kabupaten/kota di setiap Kluster selama 2014-2020	73
Tabel 4.3.2.	Pemerintah Kabupaten/kota yang selalu menjadi Rujukan selama 2014-2020.	75

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatra tahun 2014-2020	11
Grafik 4.1.2.	Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatra tahun 2014-2020	12
Grafik 4.1.3.	Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020	15
Grafik 4.1.4.	Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020	15
Grafik 4.1.5	Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan	15
Grafik 4.1.6.	Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020	15
Grafik 4.1.7.	Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020	15
Grafik 4.1.8.	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa dan Bali tahun 2014-2020	21
Grafik 4.1.9.	Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa dan Bali tahun 2014-2020	22
Grafik.4.1.10.	Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota	25
	Setiap Provinsi di Kawasan Jawa-Bali Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.11.	Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi	
	di Kawasan Jawa-Bali tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.12.	Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa- Bali Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.13.	Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa-Bali Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.14.	Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa-Bali Tahun 2014-2020	25
Grafik 4.1.15.	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020	30

Grafik 4.1.16.	Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020	31
Grafik 4.1.17	Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020	33
Grafik 4.1.18	Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di	33
	Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.19	Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di	33
	Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.20	Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020	33
Grafik 4.1.21	Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan Tahun 2014- 2020	33
Grafik 4.1.22.	Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020	38
Grafik 4.1.23.	Tingkat Kemiskinan Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020	39
Grafik.4.1.24	Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota	42
	Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.25	Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020	42
Grafik 4.1.26	Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi	42
	di Kawasan Papua Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.27	Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Papua 2014-2020	42
Grafik 4.1.28	Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020	42
Grafik 4.1.29	Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di	45
	Kawasan Maluku Tahun 2014-2020.	

Grafik 4.1.30	Belanja Pendidikan perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020	49
Grafik 4.1.31	Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di	49
	Kawasan Maluku Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.32	Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020	49
Grafik 4.1.33	Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020	49
Grafik 4.1.34	Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020	49
Grafik 4.1.35	Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di	52
	Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020.	
Grafik 4.1.36.	Tingkat Kemiskinan Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020	53
Grafik 4.1.37	Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020	55
Grafik 4.1.38	esehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020	55
Grafik 4.1.39	Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di	55
	Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020	
Grafik 4.1.40	Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020	55
Grafik 4.1.41	Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014- 2020	55
Grafik 4.1.42.	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020	59
Grafik 4.1.43.	Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020	59
Grafik 4.1.44.	Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020	60

Grafik 4.1.45.	Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020	60
Grafik 4.1.46.	Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap di Kawasan Sulawesi 2014-2020	60
Grafik 4.1.47.	Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap	60
	Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020	
Grafik 4.1.48.	Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Rata-Rata Kabupaten/Kota	60
	Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020	
Grafik 4.2.	Mean Efisiensi Relatif kabupaten/kota antar Kawasan	63

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.3.1. Kaitan Belanja Pemerintah dengan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di 20 Pemerintah Daerah di Indonesia

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan dan program pemerintah yang tercermin dalam belanja ikut menentukan arah pembangunan, sehingga pemerintah dituntut untuk mengalokasikan belanja secara efisien dan produktif.

Rasio output-input digunakan dalam pengukuran efisiensi dan produktivitas. Output yang sering digunakan dalam pengukuran efisiensi pemerintah adalah pendidikan (1), kesehatan (2), infrastruktur (3), pertumbuhan ekonomi (4), dan kemiskinan (5).

Studi empiris tersebut memperlihatkan bahwa output dalam pengukuran efisiensi pemerintah berupa pencapaian kesejahteraan masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi atau kemiskinan. Namun efisiensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menurunkan kemiskinan belum menjadi perhatian. Isu ini perlu diangkat karena ada kaitan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Studi terdahulu menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan (6). Studi lain mengungkapkan pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemiskinan (7). Peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi ini dapat menimbulkan permasalahan lain seperti ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Alokasi belanja pemerintah yang efisien dan produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memihak orang miskin (disebut pro-poor growth) perlu dilakukan. Sayangnya, kajian ini masih sedikit dilakukan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk menghasilkan model efisiensi dan produktivitas belanja pemerintah yang bersifat *pro-poor growth* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat menurunkan kemiskinan.

Kajian tentang model efisiensi dan produktivitas belanja *pro-poor growth* menjadi urgen untuk dilakukan karena saat ini semakin banyak negara yang mengalami peningkatan kemiskinan sejak pandemic covid-19 tahun 2020 melanda, termasuk Indonesia. Dari enam kawasan di Indonesia, kemiskinan terendah ada di Kalimantan, sebaliknya, kemiskinan tertinggi ada di Papua & Maluku. Jawa mengalami peningkatan kemiskinan tertinggi. Kondisi kemiskinan bisa bertambah buruk jika pemerintah tidak mampu mengalokasikan belanja secara efisien dan produktif.

Kajian ini diperlukan untuk menghasilkan kluster kabupaten/kota yang efisien dan produktif di setiap kawasan dalam mengalokasikan belanja *pro-poor growth* agar pertumbuhan ekonomi tetap positif dan kemiskinan terus menurun dalam jangka panjang. Model determinan efisiensi pemerintah yang dihasilkan akan dapat memprediksi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) mengukur dan mengelompokkan (clustering) efisiensi belanja pemerintah *pro-poor growth* di setiap kawasan di Indonesia, (2) mengukur dan mengelompokkan (clustering) produktivitas belanja pemerintah *pro-poor growth*, dan (3) menganalisis dummy pemekaran wilayah PDRB/kapita, pajak, dan kepadatan penduduk sebagai determinan efisiensi pemerintah.

Dengan tema penguatan modal sosial, dan topik pengentasan kemiskinan, hasil penelitian dalam waktu 2 tahun ini memberikan model efisiensi dan produktivitas belanja *pro-poor growth* serta determinan efisiensi di setiap kawasan di Indonesia. Tahun 1, model efisiensi menjelaskan karakteristik (*cluster*) pemda berdasarkan efisiensi serta *role model* bagi pemda yang inefisien. Tahun 2, model produktivitas menjelaskan karakteristik (*cluster*) pemda produktif & tidak produktif, dan model determinan efisiensi pemerintah.

Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan (*pro-poor growth*) sebagai output dalam pengukuran efisiensi dan produktivitas belanja pemerintah relatif sedikit. Penelitian dengan pendekatan kawasan dalam menjelaskan *pro-poor growth* diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi publik.

#### BAB II. KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. EFISIENSI

Efisiensi menjadi isu penting dalam kinerja pemerintahan. Konsep efisiensi terkait pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghindari pemborosan (8). Efisiensi belanja pemerintah menjadi bagian esensial dalam pengelolaan keuangan yang memengaruhi kualitas layanan publik (9). Pengukuran efisiensi menggunakan rasio output/input. Studi terdahulu menggunakan beberapa output dalam mengukur efisiensi belanja pemerintah yaitu pendidikan (10,11), kesehatan (12–14), fasilitas publik dan infrastruktur (5,15–17),

Studi tersebut menjelaskan output dalam pengukuran efisiensi merupakan capaian layanan dasar pemerintah. Output lain dalam pengukuran efisiensi adalah kesejahteraan masyarakat, berupa pertumbuhan ekonomi (9,18,19) dan kemiskinan (5,20). Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hal ini tergantung pada hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Studi terdahulu menunjukkan kemiskinan memengaruhi pertumbuhan ekonomi (21,22). Studi lain menjelaskan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan (23–25). Ada juga hasil sebaliknya, pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemiskinan (7). Peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi ini dapat menimbulkan permasalahan lain seperti ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah seharusnya mengalokasikan belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat menurunkan kemiskinan (*pro-poor growth*). Program yang bersifat *pro-poor growth* memungkinkan penduduk berpenghasilan rendah untuk menerima manfaat lebih banyak dari adanya pertumbuhan ekonomi (26–28). Dalam kondisi ini, pertumbuhan pendapatan orang miskin meningkat lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tidak miskin, sehingga disebut pertumbuhan ekonomi yang memihak orang miskin.

Namun demikian, kajian efisiensi belanja dengan dua output ini masih jarang dilakukan. Padahal model efisiensi belanja ini dapat membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar ketimpangan pendapatan tidak semakin lebar yang akan menimbulkan permasalahan yang lain, seperti peningkatan kriminalitas.

Untuk itu model efisiensi belanja yang bersifat *pro-poor growth* perlu dianalisis. Dengan alokasi belanja yang efisien, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif dan kemiskinan menurun.

#### 2.2. PRODUKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH

Selain efisiensi, isu penting yang perlu diangkat adalah produktivitas pemerintah. Efisiensi mengungkapkan keberhasilan menggunakan input dalam menghasilkan output pada saat tertentu, bersifat statis, sementara produktivitas membandingkan pertumbuhan output dengan pertumbuhan input dalam jangka panjang (29). Jadi, produktivitas bersifat dinamis, dan mengungkapkan keberhasilan menghasilkan output dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kajian produktivitas belanja pemerintah perlu dilakukan.

Studi terdahulu menggunakan pertumbuhan ekonomi dalam mengukur produktivitas pemerintah (30–33). Hal ini mendukung teori pertumbuhan endogen yang menjelaskan belanja pemerintah yang produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (34).

Terkait dengan efisiensi yang telah diuraikan sebelumnya, maka produktivitas belanja *propoor growth* juga seharusnya dikaji. Model produktivitas belanja *pro-poor growth* ini dapat memberikan perspektif baru tentang alokasi belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menurunkan kemiskinan. Model ini akan memberikan manfaat bagi perekonomian dalam jangka panjang, seperti ketimpangan pendapatan semakin mengecil dan kriminalitas semakin menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang akan tercapai. Namun, kajian sejenis masih jarang dilakukan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai produktivitas belanja *pro-poor growth*.

#### 2.3. BELANJA PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI PRO-POOR GROWTH

Variabel yang digunakan sebagai input baik dalam efisiensi maupun produktivitas pemerintah adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah yang sering menjadi input ialah belanja untuk R&D (4), pendidikan (11,35), kesehatan (36,37), dan sosial (8).

Studi terdahulu mengungkapkan adanya kombinasi beberapa jenis belanja yang dialokasikan dengan tujuan khusus, seperti untuk mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*) dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Untuk tujuan mengentaskan kemiskinan, pemerintah mengalokasikan sebagian besar belanja dalam belanja perlindungan sosial (5) dan belanja pengembangan (20). Kombinasi belanja lain adalah belanja pendidikan, kesehatan dan

perlindungan sosial (38). Ada juga yang mengaplikasikan belanja ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (39).

Sedangkan belanja yang bersifat *pro-growth* merupakan belanja infrastruktur pada bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi (40). Studi lain menyebutkan kombinasi dari belanja pendidikan, kesehatan, sosial sebagai belanja *pro-growth* (41).

Selain itu, studi lain menemukan kombinasi belanja dengan tujuan *pro-poor growth*, seperti kombinasi belanja kesehatan dan pendidikan (42,43). Dapat disimpulkan, beberapa belanja yang sering digunakan yaitu kombinasi belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Penelitian ini akan mengkombinasikan belanja pro-poor dan pro-growth tersebut menjadi belanja *pro-poor growth*. Untuk itu, lima jenis belanja pro-poor growth berupa belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, serta fasilitas umum & perumahan rakyat. Selanjutnya, belanja yang dipakai dalam pengukuran efisiensi dan produktivitas merupakan belanja/kapita untuk 5 jenis belanja. Penggunaan belanja/perkapita dipilih karena salah satu penentuan jumlah belanja adalah jumlah penduduk. Penduduk yang sedikit memiliki belanja yang kecil, sebaliknya, penduduk yang banyak mengakibatkan belanja besar. Untuk itu, ukuran belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja/kapita untuk lima jenis belanja.

#### 2.4. DETERMINAN EFISIENSI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian selanjutnya adalah determinan (faktor penentu) efisiensi belanja pemerintah. Beberapa faktor ditemukan dalam studi terdahulu dan masih menyimpan ketidakpastian hubungan dengan efisiensi. Pertama, pemekaran wilayah. Ada kontradiksi tentang dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja pemerintah. Di satu sisi pemekaran wilayah melemahkan ketercapaian kesejahteraan masyarakat (44,45). Di sisi lain itu dapat mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi belanja pemerintah (46). Studi lain menyebutkan pemekaran wilayah tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemerintah (47,48). Dalam penelitian ini, pemekaran wilayah merupakan dummy variable, dilihat dari status kabupaten/kota, daerah mekar atau tidak. Hipotesis penelitian ke-1 adalah: tingkat efisiensi pemerintah daerah mekar lebih rendah daripada daerah tidak mekar.

Kedua, PDRB per kapita. PDRB per kapita mengukur pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu kawasan yang mencerminkan tingkat kemakmuran wilayah. Studi terdahulu menjelaskan PDRB per kapita yang tinggi dikaitkan dengan tingkat efisiensi belanja pemerintah

yang tinggi pula (49–51). Namun, literatur berbeda menemukan bahwa PDRB per kapita tidak signifikan mempengaruhi efisiensi belanja pemerintah (52). Untuk itu, hipotesis penelitian ke-2 adalah: PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap efisiensi pemerintah.

Ketiga, pajak, yang menunjukkan kapasitas pendapatan daerah. Secara khusus, semakin tinggi pajak semakin efisien daerah dalam belanja. Studi terdahulu mengungkapkan ada pengaruh positif pajak terhadap efisien belanja pemerintah (53,54). Namun studi lain menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap efisiensi (55,56). Hipotesis penelitian ke-3 adalah: pajak berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja pemerintah.

Terakhir, kepadatan penduduk. Beberapa peneliti menemukan bahwa kepadatan penduduk kepadatan penduduk berdampak negatif terhadap efisiensi (12,51,57). Secara berbeda hasil investigasi peneliti lain menyatakan kepadatan penduduk berpengaruh positif (47,55,58). Sementara, beberapa menampilkan fakta bahwa kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap efisiensi (53,54,59). Hipotesis penelitian ke-4 adalah: kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap efisiensi

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

#### 3.1. DISAIN PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan eksplanatori. Dalam dua tahun penelitian, penelitian ini mengukur efisiensi dan produktivitas belanja *pro-poor growth* pemerintah kabupaten/kota serta menganalisis determinan efisiensi belanja di setiap kawasan.

Pada tahun pertama, penelitian ini mengukur efisiensi belanja *pro-poor growth* pemerintah kabupaten/kota di tujuh kawasan di Indonesia. Selanjutnya dibuat klusterisasi efisiensi belanja *pro-poor growth* pemerintah selama 2014-2020.

Pada tahun kedua akan diukur produktivitas belanja *pro-poor growth* pemerintah kabupaten/kota di tujuh kawasan di Indonesia. selain itu akan dianalisis faktor-faktor yang menjadi determinan efisiensi belanja di setiap kawasan.

#### 3.2. JENIS DAN SUMBER DATA

Data penelitian berupa data panel, terdiri dari kabupaten/kota di tujuh kawasan pada tahun 2014-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan BPK.

Data variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga kelompok. Untuk pengukuran efisiensi dan produktivitas, digunakan variabel input dan output. Untuk variabel input, terdapat lima (5) input yang digunakan, yaitu belanja pendidikan/kapita, belanja kesehatan /kapita, belanja ekonomi/ kapita, belanja perlindungan sosial/kapita serta belanja perumahan & fasilitas umum/kapita. Sementara itu untuk variabel output, ada 2 variabel, yang terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. yang terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pengentasan kemiskinan (berupa persentase penduduk tidak miskin, formula: 100% – tingkat kemiskinan).

Selanjutnya, untuk determinan efisiensi, ada empat (4) variabel independen. Varaibel independen ini terdiri dari pemekaran wilayah, PDRB per kapita, pajak daerah, dan kepadatan penduduk

#### 3.3. METODE ANALISIS

Penelitian ini merupakan penelitian dua tahap yang berlangsung dalam dua tahun. Tahap pertama (tahun pertama). Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi belanja *pro-poor growth* pemerintah kabupaten/kota di setiap kawasan. Model efisiensi, cluster pemda yang efisien, inefisien dan role model pemerintah dalam pengentasan kemiskinan akan dihasilkan untuk setiap kawasan.

Metode yang digunakan dalam tahun pertama adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan variable return to scale (VRS) dengan model output oriented (61).

#### Model efisiensi:

Di mana  $Y_1$ = pertumbuhan ekonomi;  $Y_2$  = persentase penduduk tidak miskin;  $X_1$ = belanja pendidikan/kapita,  $X_2$ = belanja kesehatan/kapita,  $X_3$ = belanja ekonomi/kapita,  $X_4$ = belanja perlindungan sosial/kapita, dan  $X_5$ = belanja perumahan & fasilitas umum/kapita.

Kemudian, tahap kedua penelitan (tahun kedua), akan dilakukan pengukuran produktivitas belanja *pro-poor growth* dan menganalisis determinan efisiensi belanja. Pada tahap kedua ini dihasilkan model produktivitas belanja *pro-poor growth* (ada tujuh kluster produktivitas), dan model determinan efisiensi belanja untuk setiap kawasan.

#### Metode analisis yang digunakan:

 Pengukuran produktivitas: Malmquist Productivity Index (MPI). MPI digunakan untuk mengukur total factor productivity (TFP) dari belanja pro-poor growth. Indeks TFP terbentuk dari nilai efficiency change dan technology change (61) selama periode 2014-2020. 2. Determinan efisiensi: Panel Tobit Regression. Model tobit mendefinisikan variable dependen "disensor" dimana nilai aktual yang diamati pada nilai efisiensi bernilai 0 (minimum) dan 1 (maksimum). Untuk data tersensor, penggunaan OLS menyebabkan estimasi kuadrat terkecil menjadi bias dan tidak konsisten, sehingga penggunaan model tobit lebih tepat digunakan (62,63).

Model regresi panel tobit dalam penelitian:

$$Eff_{it} = \begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 \ \mathrm{DPM}_{it} + \beta_1 \mathrm{lnPDRB} Kap_{it} + \beta_2 \ \mathrm{pajak}_{it} + \beta_3 \ pop_{it} + \mathcal{E}_{it}, \ if \ 0 < Effit < 1 \\ 1 \ if \ Effit = 1 \end{cases}$$

Dimana Eff= tingkat efisiensi, DPM= dummy pemekaran wilayah, PDRBkap= produk domestik regional bruto per kapita, pajak= pajak daerah, dan pop= kepadatan penduduk.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji simultan (F-Test) dan uji parsial (t-test).

#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang akan dijawab dalam dua tahun penelitian. Tujuan pertama adalah untuk mengukur dan mengelompokkan (*clustering*) efisiensi belanja pemerintah *pro-poor growth* di setiap kawasan di Indonesia. Tujuan ini akan dijawab pada tahun pertama penelitian. Tujuan kedua yaitu untuk mengukur dan mengelompokkan (*clustering*) produktivitas belanja pemerintah *pro-poor growth*. Tujuan ketiga ialah untuk menganalisis *dummy* pemekaran wilayah PDRB/kapita, pajak, dan kepadatan penduduk sebagai determinan efisiensi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitan tahun pertama akan menghasilkan pengukuran efisiensi dan pengelompokkan (*clustering*) efisiensi belanja pemerintah *pro-poor growth* di setiap kawasan di Indonesia. Pada tahun pertama juga akan menguraikan *role model* bagi pemda yang inefisien di setiap kawasan di Indonesia. Sebelum hasil pengukuran efisiensi diuraikan, terlebih dahulu disajikan input dan output yang digunakan dalam pengukuran efiseinsi. Input dan output akan dijelaskan untuk setiap kawasan di Indonesia.

#### 4.1. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Gambaran umum mengenai ouput dan input yang diterapkan pada penelitian ini pada setiap Kawasan akan dijelaskan secara rinci untuk mendapatkan pemahaman meyeluruh terkait kondisi makroekonomi dan kebijakan anggaran yang dihadapi oleh setiap Kabupaten/Kota di setiap kawasan penelitian.

#### **4.1.1. SUMATERA**

#### 4.1.1.1. Output

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sumatera

Pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota tertinggi di Kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-2020 terdapat di Provinsi Jambi tahun 2014, yaitu sebesar 7,32 persen. Perekonomian Jambi pada tahun 2014 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahuntahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Jambi tahun 2014 mencapai 7,76 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,73 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif (Grafik 4.1.1).

Sebaliknya Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota terendah di kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-2020, dimana pada tahun 2020 mencapai angka -3,8 persen. Seperti dalam hal ini, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,81% (y-on-y) dibandingkan periode triwulan III 2019 yang mampu tumbuh sebesar 4,92%, Laju pertumbuhan ekonomi secara (y-on-y) triwulan III 2020 Provinsi didorong oleh penurunan kategori perdagangan besar dan eceran yang memberikan andil pertumbuhan sebesar -1,83 persen, kategori konstruksi yang memberikan andil pertumbuhan sebesar -1,10 persen (DPJb Kepri, 2021).

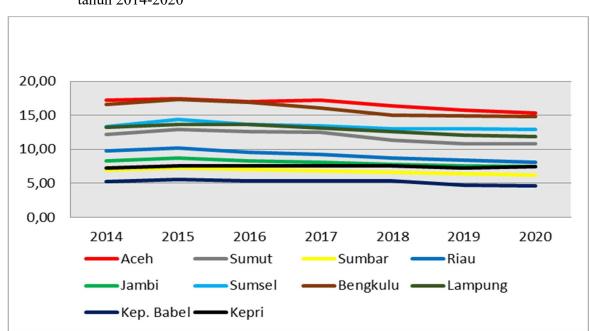
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2019 2014 2015 2016 2017 2018 -2,00 -4,00 -6,00 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu -Lampung Kep. Babel --Kepri

Grafik 4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatra tahun 2014-2020

### b. Tingkat Kemiskinan di Kawasan Sumatera

Tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di Kawasan Sumatera terdapat di Provinsi Aceh, dimana tingkat kemiskinannya mencapai 17,47 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2020, Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 sebesar 0,1% (yoy) serta meningkatkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 menjadi 6,59%, lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42%) diduga menjadi salah satu pendorong peningkatan tingkat kemiskinan. Sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01%)

terdampak Covid-19 yang mengakibatkan orang-orang tersebut menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, ataupun pengurangan jam kerja. Selain itu, faktor struktural seperti kebijakan atau program yang masih belum menyasar kepada akar masalah kemiskinan menjadi salah satu penyebab terhambatnya penanggulangan kemiskinan di Aceh. Grafik 4.1.2 menjelaskan kondisi kemiskinan di Sumatera. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera pada September 2020 dengan 15.43% penduduk miskin. Persentase ini lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Sumatera (10,22%) dan Nasional (10,19%) (BI, 2021).



Grafik 4.1.2. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatra tahun 2014-2020

Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2019 & 2020, dimana tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kotanya hanya 4,7 persen. BI (2021) Bangka Belitung berada pada peringkat ke-4 setelah Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta untuk provinsi dengan penduduk miskin terendah pada september 2020, sementara garis kemiskinan perkapita di Provinsi Kep.Bangka Belitung mencapai Rp727.114,-/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini jauh lebih tinggi dari garis kemiskinan rata-rata nasional yang hanya sebesar Rp458.947,-.

Potret pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera (lihat Tabel 4.1.1.a dan 4.1.1.b) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Dengan

capaian pertumbuhan ekonomi minimal hingga tembus ke level minus 20, 34 persen di tahun 2015 (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada angka 13,23 persen di tahun 2017 yaitu di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara untuk tingkat kemiskinan terendah berada pada angka 2,01 persen di tahun 2017 (Provinsi Sumatera Barat) dan tertinggi pada angka 34,08 persen di tahun 2015 (Provinsi Riau). Kepulauan Meranti merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya Kabupaten Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-2020.

Tabel 4.1.1.a. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi tahun 2014-2020

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Pertumbuhan ekonomi											
Aceh	Min	-7,39	-20,34	-1,52	2,19	1,28	1,26	-3,29			
	Max	5,11	5,00	5,93	13,23	10,14	6,77	3,54			
Sumut	Min	4,20	4,14	4,12	4,11	4,35	4,35	-1,98			
	Max	7,50	6,21	6,27	6,09	6,03	6,05	1,80			
Sumbar	Min	5,57	5,20	5,02	5,08	4,89	2,40	-10,46			
	Max	6,47	6,41	6,17	6,23	6,06	5,89	-0,87			
Riau	Min	-3,85	-2,94	-2,54	-1,72	-1,69	-1,89	-4,38			
	Max	6,90	5,57	5,68	6,12	5,39	5,99	2,24			
Jambi	Min	5,20	1,81	2,65	3,07	2,94	4,21	-3,87			
	Max	9,07	7,06	6,84	6,02	6,77	5,05	3,69			
Sumsel	Min	-0,01	2,14	2,17	3,02	3,21	3,52	-0,25			
	Max	11,51	7,62	6,78	7,16	8,65	7,02	0,41			
Bengkulu	Min	4,82	4,31	5,00	4,81	4,80	4,89	-0,25			
	Max	6,12	6,02	6,13	5,46	5,48	5,41	0,26			
Lampung	Min	2,87	4,58	4,54	4,58	3,71	3,81	-2,29			
	Max	7,05	6,33	6,43	6,28	6,20	6,21	-1,02			
Kepulauan Babel	Min	1,50	0,31	3,05	3,46	3,42	1,23	-5,43			
	Max	5,17	5,03	5,17	5,30	5,38	7,08	-0,66			
Kepri	Min	3,70	2,38	2,90	-0,10	-8,21	-0,13	-7,83			
	Max	7,16	6,87	6,17	6,08	5,05	5,92	-0,68			

Tabel 4.1.1.b. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi tahun 2014-2020

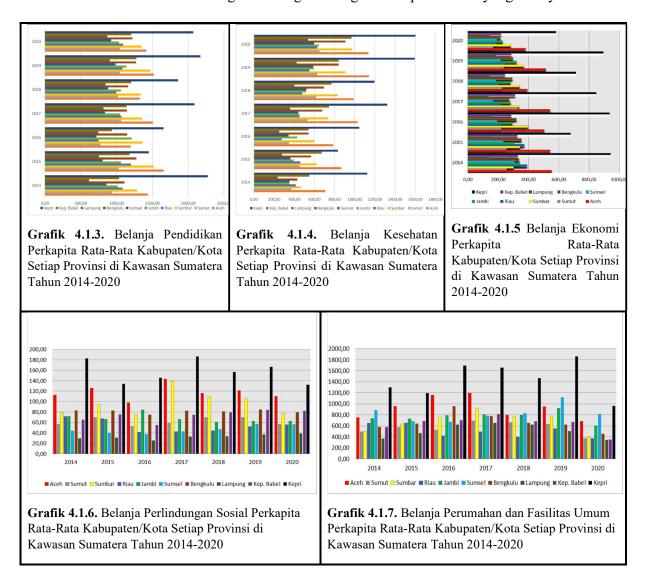
Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Kemiskinan										
Aceh	Min	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,90		
	Max	22,97	21,95	21,86	22,11	21,25	20,78	20,20		
Sumut	Min	4,56	4,74	4,86	4,62	4,13	3,89	3,88		
	Max	29,28	32,62	30,92	29,06	26,72	25,51	25,69		
Sumbar	Min	2,25	2,22	2,21	2,01	2,39	2,17	2,16		
	Max	14,96	15,52	15,12	14,67	14,44	14,43	14,35		
Riau	Min	3,17	3,27	3,07	3,05	2,85	2,52	2,62		
	Max	33,85	34,08	30,89	28,99	27,79	26,93	25,28		
Jambi	Min	3,33	3,43	3,13	2,78	2,76	2,81	3,03		
	Max	13,55	14,17	12,76	12,58	12,38	11,54	10,95		
Sumsel	Min	8,90	9,64	9,19	8,89	8,77	8,90	9,07		
	Max	18,02	19,73	20,00	19,49	19,12	19,49	19,47		
Bengkulu	Min	8,22	8,33	8,71	8,41	8,20	8,80	9,30		
	Max	21,96	22,98	22,36	21,54	19,60	19,10	18,56		
Lampung	Min	6,57	8,20	8,00	7,66	7,55	7,47	7,33		
	Max	23,32	23,20	22,92	21,55	20,85	19,90	19,30		
Kepulauan Babel	Min	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70		
	Max	8,48	8,38	7,85	7,77	7,56	6,60	6,52		
Kepri	Min	4,11	4,34	4,33	4,64	4,68	4,42	4,43		
	Max	14,75	14,95	14,36	13,84	13,55	12,88	13,85		

#### 4.1.1.2. Input

Pada studi ini digunakan lima instrumen input yaitu berupa belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, belanja perlindungan sosial dan belanja perumahan dan fasilitas umum. Pemilihan kelima input ini didasari oleh urgensinya terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan pengeluarannya maka akan mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan atau dengan kata lain ada penurunan jumlah penduduk miskin.

Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi di Sumatera tidaklah sama. Ada yang lebih berorientasi pada sektor Pendidikan sehingga mengalokasikan belanja yang lebih besar disektor ini, ada yang lebih condong pada bidang Kesehatan dengan mengalokasi dana belanja yang lebih besar untuk bidang ini. Namun juga ada

yang menempatkan pengeluaran lebih untuk bidang perlindungan sosial dan belanja perumahan dan fasilitas umum. Dari beberapa Kabupaten/Kota terlihat ada yang memiliki alokasi belanja yang lebih besar untuk di kelima bidang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya.



Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan belanja pemerintah perkapita (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, dan perumahan & fasum) yang secara umum memiliki nilai paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan sumatera, terutama di tahun 2020. Dari sisi komposisi per fungsi, sejalan dengan fokus pemerintah dalam melaksanakan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kepri pada Tahun 2020 maka fungsi yang menjadi prioritas adalah pelayanan umum. Fungsi pelayanan umum mampu berkontribusi sebesar 34,56 persen dari total realisasi APBN sampai dengan Triwulan III 2020, dan realisasi

meningkat sebesar 60,72 persen dibandingkan Triwulan III 2019. Di samping itu meskipun situasi pandemi membuat hampir seluruh realisasi dari fungsi menurun, namun fungsi perumahan dan fasilitas umum mampu bertumbuh sangat signifikan dibandingkan Triwulan III 2019 (DPJPb Kepri, 2020).

#### Belanja Pendidikan Perkapita Kawasan Sumatera

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Sumatera berada di Provinsi Aceh, yaitu sebesar 4.098,061 . Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Sabang Provinsi Aceh Tahun 2014.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang.

Tabel 4.1.2. Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Belanja l	Pendidikan po	er kapita			
Aceh	min	723,030	908,533	11,483	1013,229	941,421	949,676	982,650
	max	4098,061	3908,843	3942,993	3458,929	3267,440	4215,455	3387,301
Sumut	min	492,827	404,603	0,000	1,443	406,298	535,285	378,088
	max	1799,181	2211,196	2379,552	3102,618	2334,268	2435,228	2233,479
Sumbar	min	110,532	790,912	215,074	695,075	783,181	832,662	756,272
	max	2299,497	2564,734	2914,791	2231,591	2395,133	2497,751	2428,344
Riau	min	3,490	600,527	132,659	683,436	481,448	582,163	641,027
	max	1611,900	2161,476	1995,215	1613,810	1500,133	1742,282	1407,582
Jambi	min	671,500	743,813	123,315	754,925	739,995	747,009	690,578
	max	2260,291	2161,259	3594,756	1839,058	1904,418	1986,099	1734,982
Sumsel	min	291,979	157,618	59,789	226,325	714,397	713,201	652,867
	max	1303,055	1270,085	1359,403	1103,811	1067,179	1261,027	1353,767
Bengkulu	min	673,545	969,742	355,359	852,252	827,532	858,505	792,028
	max	1753,940	1787,265	1867,732	1511,377	1570,735	1686,430	1640,241
Lampung	min	326,739	522,551	197,920	541,713	593,655	666,439	601,382
	max	1162,696	1367,137	1043,150	1275,837	1244,770	1253,067	1256,739
Kepulauan Babel	min	752,524	874,243	189,808	839,938	896,139	998,176	849,447
	max	1624,109	1800,473	1925,189	1886,977	1783,520	1907,668	1676,247
Kepri	min	437,323	483,805	32,569	413,010	438,773	449,770	421,271
	max	5683,699	2918,202	3661,688	3942,179	4136,498	5048,381	4522,705

## Belanja Kesehatan Perkapita Kawasan Sumatera

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Sumatera berada di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 4.129,373 . Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Kepualaun Anambas tahun 2019.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang.

Tabel 4.1.3. Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Belanja	Kesehatan Pe	r Kapita			
Aceh	min	374,872	409,389	21,746	452,491	426,973	475,287	501,914
	max	1791,566	2360,953	2452,505	2589,049	2651,245	2969,100	2757,141
Sumut	min	135,320	147,076	0,000	116,475	184,565	219,920	238,940
	max	1291,220	1450,751	1547,614	1540,889	1781,801	1593,579	1723,669
Sumbar	min	89,917	230,427	102,321	282,128	337,798	328,964	354,849
	max	1453,060	1743,400	2207,724	2251,782	2383,077	2496,361	2566,122
Riau	min	23,256	192,026	32,844	198,510	179,691	207,322	263,281
	max	713,178	801,149	851,955	930,352	910,784	1136,366	1187,842
Jambi	min	267,045	288,500	37,236	334,518	349,163	396,641	466,025
	max	404,987	557,700	1396,092	634,965	777,024	934,593	1077,435
Sumsel	min	181,394	140,060	41,777	93,782	264,118	303,516	333,911
	max	740,475	730,447	685,335	794,482	944,163	952,448	1027,325
Bengkulu	min	230,577	308,136	112,170	362,781	406,947	450,174	532,487
	max	576,758	856,473	1085,133	1013,200	924,061	1326,595	1486,367
Lampung	min	114,873	114,858	149,881	132,513	172,045	186,549	207,391
	max	889,463	955,611	386,311	1289,394	1281,869	1493,776	1761,893
Kepulauan Babel	min	347,927	476,894	80,600	456,708	557,861	624,709	729,555
	max	716,697	986,493	999,458	1208,012	1159,858	1266,282	1300,344
Kepri	min	230,392	244,371	17,103	284,290	235,146	251,973	293,696
	max	3042,233	1892,411	3174,079	2661,600	2649,698	4129,373	3461,589

## Belanja Ekonomi Perkapita Kawasan Sumatera

Belanja Ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Sumatera berada di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 3.052,002 . Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang.

Tabel 4.1.4. Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Belanja Ekonomi Per Kapita										
Aceh	min	172,182	196,822	29,143	194,726	121,015	140,717	119,240		
	max	2066,893	1683,733	1996,876	1721,189	1423,209	1474,327	875,773		
Sumut	min	77,275	35,042	0,000	60,544	53,797	66,781	42,231		
	max	909,949	915,936	1322,677	3252,059	690,348	721,901	650,444		
Sumbar	min	139,199	143,640	33,868	113,927	104,424	139,047	105,343		
	max	636,086	889,899	1422,596	898,048	867,087	797,448	752,231		
Riau	min	64,332	169,408	12,602	128,431	107,910	124,465	107,929		
	max	793,215	797,897	780,670	396,172	453,702	522,360	312,067		
Jambi	min	135,716	148,994	18,374	110,223	107,908	129,968	80,314		
	max	676,581	608,003	704,594	556,333	581,426	675,341	475,136		
Sumsel	min	77,441	67,329	31,266	17,691	74,057	95,582	75,007		
	max	778,648	737,857	402,214	353,745	320,439	388,407	688,278		
Bengkulu	min	130,973	175,331	33,039	153,538	145,666	191,084	112,152		
	max	474,936	562,825	780,062	461,298	443,738	422,871	315,965		
Lampung	min	71,104	78,372	25,506	47,448	65,478	74,485	49,417		
	max	292,348	263,684	319,135	277,402	319,505	850,725	485,953		
Kepulauan Babel	min	181,235	191,477	38,559	176,434	128,762	176,639	116,069		
	max	657,505	622,047	614,401	506,251	492,673	478,336	359,015		
Kepri	min	193,762	206,725	9,178	243,482	217,128	257,565	188,718		
	max	2733,212	1793,640	3052,022	1724,349	1853,333	2561,332	1455,757		

#### Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Kawasan Sumatera

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Sumatera berada di Provinsi Aceh, yaitu sebesar 505,883. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh Tahun 2016.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang.

Tabel 4.1.5. Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Belanja Perlindungan Sosial Per Kapita										
Aceh	min	12,765	28,772	3,528	26,397	17,539	20,909	23,430		
	max	360,684	383,265	505,883	481,952	416,027	316,672	315,925		
Sumut	min	8,097	8,983	0,000	5,988	10,680	12,280	8,745		
	max	266,619	314,877	326,262	281,360	263,084	274,750	222,441		
Sumbar	min	21,751	23,255	6,013	13,394	12,350	29,752	22,686		
	max	220,872	306,966	248,356	1045,794	301,497	283,329	194,765		
Riau	min	4,335	34,279	2,013	19,873	21,214	25,782	25,912		
	max	137,446	122,469	128,279	72,264	87,022	94,716	101,916		
Jambi	min	31,006	34,811	3,656	21,640	26,539	30,343	26,587		
Jambi	max	111,335	128,271	406,335	143,266	134,698	166,343	171,605		
Sumsel	min	12,205	14,901	1,929	7,820	18,564	22,062	17,553		
	max	120,425	105,364	126,031	101,464	95,151	116,681	158,707		
Bengkulu	min	33,270	44,737	13,148	47,468	42,833	41,605	31,487		
	max	159,018	135,737	157,391	105,633	115,687	113,700	157,483		
Lampung	min	12,630	12,767	7,330	11,318	14,998	14,247	13,509		
	max	74,141	69,725	70,769	70,731	87,041	96,379	79,833		
Kepulauan Babel	min	39,988	45,107	14,017	52,830	54,587	60,956	53,066		
	max	95,345	140,614	124,847	127,480	127,968	137,528	107,961		
Kepri	min	44,041	43,377	3,303	34,413	38,134	36,784	48,633		
	max	367,475	276,996	496,715	305,268	292,008	294,755	227,902		

## Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Kawasan Sumatera

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Sumatera berada di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 6.502,106. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang perumahan dan fasum.

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau merupakan kabupaten dengan belanja kesehatan perkapita, belanja ekonomi perkapita, dan belanja perumahan & fasum tertinggi di

kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya, tidak terdapat belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan & fasum di Kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 2016.

Tabel 4.1.6. Deskripsi Input Belanja Perumahan dan Failitas Umum Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Per Kapita									
Aceh	min	272,223	365,316	51,830	412,859	219,032	395,833	254,454	
	max	1704,701	3137,053	3211,291	2820,912	3647,409	3499,205	2344,020	
Sumut	min	173,150	229,625	0,000	25,455	165,501	254,292	95,779	
	max	1647,811	1973,184	2089,594	1748,010	2288,388	2265,912	816,594	
Sumbar	min	102,605	221,331	36,397	44,056	60,537	81,909	40,045	
	max	1297,410	1584,423	2293,923	3261,082	2252,540	2617,476	1236,134	
Riau	min	18,597	224,036	5,837	0,153	3,180	17,869	8,002	
	max	1177,849	1747,339	1842,198	1416,400	1153,405	1433,543	754,832	
Jambi	min	422,313	419,541	169,807	389,348	456,803	482,145	236,124	
	max	1544,626	1586,050	1895,554	1790,364	1889,368	1731,567	1232,073	
Sumsel	min	307,804	305,196	72,945	185,327	229,386	309,083	402,810	
	max	1745,749	1240,872	1692,285	2202,775	3223,038	3782,205	1601,048	
Bengkulu	min	295,788	325,519	233,031	434,910	449,557	387,093	167,048	
	max	1009,141	990,725	1759,459	1334,039	1055,225	1024,736	796,143	
Lampung	min	192,076	189,507	335,967	86,425	191,370	160,484	138,652	
	max	689,268	884,668	1630,269	1274,833	1330,438	1063,591	916,648	
Kepulauan Babel	min	359,674	501,481	160,116	528,309	327,830	443,052	27,825	
	max	764,863	881,134	1185,508	2097,548	1027,821	889,919	523,299	
Kepri	min	259,058	277,880	12,508	512,872	407,217	380,452	175,209	
	max	3184,206	3175,488	6502,106	3508,398	4301,612	5093,896	2036,396	

#### 4.1.2. JAWA & BALI

#### 4.1.2.1. Output

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa dan Bali

Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2017 paling tinggi sepanjang 2014-2020 dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di kawasan Jawa-Bali, yaitu sebesar 24,899 persen. Berdasar pada Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tercatat hampir pada seluruh lapangan usaha, tertinggi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,25%, diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial

8,44%, serta informasi dan komunikasi sebesar 8,14%. Kabupaten Badung dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 25,5 menjadikannya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Bali tahun 2017.

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 020 -5,000 Jatim ——Jateng ——Jabar ——Banten ——Jakarta —

Grafik 4.1.8. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa dan Bali tahun 2014-2020

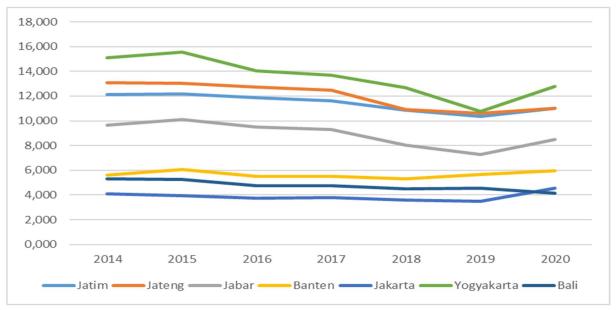
Sebaliknya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali merosot sampai menyentuh angka -7,342 persen. Tidak bisa dipungkiri pada tahun 2020 seluruh provinsi di kawasan Jawa-Bali mengalami kemerosotan yang tajam. Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bali 2021 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, secara keseluruhan tahun 2020 ekonomi Bali tumbuh kontraksi, 9,31% (yoy), lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tumbuh positif. Adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 membuat berbagai negara menerapkan kebijakan travel restriction sehingga kunjungan wisatawan menurun signifikan. Kabupaten Badung menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Bali tahun 2020, yaitu sebesar -16,52.

#### b. Tingkat Kemiskinan di Kawasan Jawa dan Bali

Menilik kondisi kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kawasan Jawa dan Bali, dominasi tingkat kemiskinan tinggi masih berada di Jawa Tengah yaitu tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada periode 2014-2020, Provinsi dengan tingkat kemiskinan

terendah ada pada Provinsi Bali. Hal ini salah satunya disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang mengakar di masyarakat Bali yaitu untuk giat bekerja dan meninggalkan sifat malas.

Grafik 4.1.9. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa dan Bali tahun 2014-2020



Provinsi DI Yogyakarta jika dilihat dari grafik diatas, merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan rata-rata Kabupaten/Kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di kawasan Jawa-Bali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pembangunan ekonomi di DIY belum merata. Akurasi dalam menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) menjadi problem mendasar dalam menyelesaikan kemiskinan di DIY. Penyebabnya adalah tingginya angka inclusion error dan exclusion error. Inclusion error berarti warga yang masuk dalam kategori sejahtera secara ekonomi malah terdaftar mendapat bantuan. Adapun exclusion error bermakna sebaliknya: warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan (DPJb Yogyakarta, 2018). Gunung Kidul merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY tahun 2015, yaitu sampai menyentuh angka 21,73 persen.

Sebaliknya, provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata tingkat kemiskinan paling rendah, Penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya, antara lain melalui berbagai subsidi dan bantuan sosial, yang khususnya ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah (BI,2019).

Tabel 4.1.7. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Jawa-Bali tahun 2014-2020

Statistik Deskriptif Output Kabupaten/Kota di Jawa-Bali								
Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan ekonomi								
Jawa Timur	min	0,080	-2,660	0,660	2,860	3,630	0,140	-6,460
	max	7,190	17,420	21,950	10,250	6,500	6,510	-0,290
Jawa tengah	min	2,920	3,880	2,540	2,580	2,990	2,270	-10,360
	max	6,310	6,280	23,540	6,980	6,480	6,810	-0,230
Jawa Barat	min	4,710	2,160	0,080	1,430	1,340	3,200	-3,590
	max	7,720	7,640	7,790	7,210	7,080	7,850	0,860
Banten	min	4,620	4,750	5,000	5,220	4,950	4,050	-6,920
	max	8,050	7,250	6,740	7,300	7,490	7,400	-0,540
DKI Jakarta	min	5,910	5,910	5,870	6,200	6,110	5,820	-2,360
	max	5,910	5,910	5,870	6,200	6,110	5,820	-2,360
DI Yogyakarta	min	4,540	4,620	4,760	5,010	5,160	5,340	-4,060
	max	5,300	5,180	5,220	5,970	10,830	13,490	-0,680
Bali	min	5,830	6,000	5,920	24,480	5,440	6,600	-16,520
	max	7,000	6,300	6,810	25,500	6,730	7,000	-4,100
			Tingkat	Kemiski	nan			
Jawa Timur	min	4,590	4,600	4,330	4,170	3,890	4,070	3,890
	max	<b>25,800</b>	25,690	24,110	23,560	21,210	20,710	22,780
Jawa tengah	min	5,040	4,970	4,850	4,620	4,140	3,980	4,340
	max	21,420	21,450	20,530	20,320	17,580	16,820	17,590
Jawa Barat	min	2,320	2,400	2,340	2,340	2,140	2,070	2,450
	max	15,950	16,280	15,600	14,800	12,710	11,410	12,970
Banten	min	<mark>1,680</mark>	1,690	1,670	1,760	1,680	3,030	2,290
	max	9,500	10,430	9,670	9,740	9,610	9,420	9,920
DKI Jakarta	min	4,090	3,930	3,750	3,770	3,570	3,470	4,530
	max	4,090	3,930	3,750	3,770	3,570	3,470	4,530
DI Yogyakarta	min	8,670	8,750	7,700	7,640	6,980	1,680	7,270
	max	20,830	21,730	20,300	20,030	18,300	17,390	18,010
Bali	min	2,210	2,330	2,060	2,060	1,980	1,780	2,020
	max	7,300	7,440	6,610	6,550	6,280	6,250	5,910

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Jawa-Bali berada di Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan pertumbuhan sebesar 25,5 persen dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Badung Provinsi Bali tahun 2020 sebesar -16,520. Pertumbuhan ekonomi Badung tahun 2020 menjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020.

Ditinjau dari segi tingkat kemiskinan, Sampang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 25,8 persen di tahun 2014. Sebaliknya terdapat 2 kabupaten, yaitu Tanggerang Selatan Provinsi Banten di tahun 2016 dan Gunung Kidul DIY pada tahun 2019 yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sebesar 1,68 persen.

## 4.1.2.2. Input

Belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa dan Bali relatif bervariasi. Target pembangunan yang ditetapkan antar daerah yang beragam mendorong adanya alokasi belanja yang berbeda untuk semua bidang, terutama belanjang pada lima bidang yang menjadi fokus studi ini.

Pada grafik 4.1.10 s.d 4.1.14 menunjukkan variabel input dalam bentuk belanja pemerintah perkapita, yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, belanja perlindungan sosial,dan belanja perumahan dan Fasilitas umum. Dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa ada 2 provinsi yang memiliki rata-rata belanja pemerintah yang tinggi untuk 5 jenis belanja pemerintah Provinsi DKI Jakarta (belanja kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) dan Provinsi Bali (Belanja Perlindungan Sosial dan Perumahan & Fasilitas umum).

Fungsi Pelayanan Umum yang merupakan belanja untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan khusus tahun 2019 adalah pelaksanaan pileg dan pilpres sehingga mendapat porsi terbesar pada tahun 2019 dengan share realisasi 66,78% terhadap total realisasi belanja, diikuti oleh Fungsi Ekonomi dengan share 14,21%. Belanja untuk fungsi ekonomi di Provinsi DKI Jakarta terlihat dari tingginya alokasi belanja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian yang masuk 10 besar K/L dengan pagu terbesar, karena Fungsi Ekonomi merupakan belanja yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui

pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan Koperasi (DPJb DKI Jaakrta, 2019).



#### Belanja Pendidikan Kawasan Jawa-Bali

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 2.189,842. Angka tersebut merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Jawa Barat, yaitu hanya yang 14,996. Belanja pendidikan sebesar ini merupakan belanja pendidikan perkapita Bandung Barat tahun 2016.

Tabel 4.1.8. Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Belanja	Pendidikan	per kapita			
Jawa Timur	min	423,715	510,325	45,120	467,690	466,715	500,375	462,897
	max	1713,429	1716,917	2189,842	1652,106	1521,996	1709,197	1585,441
Jawa tengah	min	246,462	290,518	23,056	301,112	166,044	154,294	478,746
	max	1490,529	1803,727	1561,455	1764,460	1671,343	1682,225	1495,210
Jawa Barat	min	257,941	294,881	14,996	294,071	359,826	368,926	393,820
	max	1365,602	1267,021	1291,239	1979,461	1082,544	1132,246	1114,309
Banten	min	265,759	331,128	57,254	346,622	365,503	407,353	443,852
	max	891,019	962,440	983,778	1145,193	1767,499	1110,015	859,895
DKI Jakarta	min	1085,487	1247,090	450,262	1278,426	1508,632	2062,817	1383,215
	max	1085,487	1247,090	450,262	1278,426	1508,632	2062,817	1383,215
DI Yogyakarta	min	409,702	582,859	42,002	635,699	624,112	623,172	587,793
	max	1156,864	1264,141	1412,124	1174,957	1081,226	1142,155	1008,656
Bali	min	288,294	288,069	81,335	301,272	340,483	353,520	342,549
	max	643,534	829,402	1403,258	1068,271	1299,357	1510,394	1658,440

# Belanja Kesehatan Kawasan Jawa-Bali

Belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Jawa-Bali berada di Jawa Tengah, yaitu sebesar 2.810,272. Angka tersebut merupakan belanja kesehatan perkapita dari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Jawa tengah, yaitu hanya 12,450. Belanja kesehatan sebesar ini merupakan belanja kesehatan perkapita Tegal tahun 2016.

Tabel 4.1.9. Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Belanja	Kesehatan j	per kapita			
Jawa Timur	min	106,451	155,168	34,647	166,909	192,702	247,364	226,198
	max	1238,520	1425,287	1236,837	1685,508	1790,639	1799,144	1815,881
Jawa tengah	min	102,245	158,638	12,450	132,217	220,527	252,999	148,824
	max	1450,912	1610,071	1242,739	2278,828	2527,118	2810,272	2448,750
Jawa Barat	min	102,187	130,785	0,195	86,958	175,641	192,386	241,951
	max	896,807	1251,075	1402,679	1515,421	1557,134	1844,109	1905,097
Banten	min	151,790	157,972	26,190	144,885	259,025	224,254	199,983
	max	618,598	492,124	540,161	567,310	869,667	703,044	650,973
DKI Jakarta	min	483,588	529,292	655,111	746,504	861,405	842,418	888,987
	max	483,588	529,292	655,111	746,504	861,405	842,418	888,987
DI Yogyakarta	min	175,016	218,143	9,517	318,030	321,202	338,216	382,692
	max	543,732	609,428	1699,901	698,083	896,913	938,918	957,259
Bali	min	138,609	152,951	21,724	145,845	165,739	176,516	87,854
	max	392,379	473,469	577,688	533,467	580,521	574,308	426,190

# Belanja Ekonomi Kawasan Jawa-Bali

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 596,927. Angka tersebut merupakan belanja ekonomi perkapita Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Tabel 4.1.10. Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Belanja	Ekonomi p	er kapita			
Jawa Timur	min	48,751	65,175	7,957	53,949	8,313	10,908	8,430
	max	460,197	447,820	522,339	558,954	553,555	617,834	461,510
Jawa tengah	min	58,724	65,554	7,073	41,334	64,183	56,597	40,316
	max	453,480	425,928	329,259	596,927	557,649	803,652	516,411
Jawa Barat	min	56,060	52,143	14,462	17,110	22,956	20,072	14,542
	max	288,056	287,633	348,571	433,697	426,290	500,308	361,245
Banten	min	32,917	37,707	15,077	44,599	45,624	54,612	35,110
	max	206,649	248,271	231,252	376,493	343,001	274,107	211,748
DKI Jakarta	min	310,719	354,920	236,877	296,602	354,522	492,738	171,907
	max	310,719	354,920	236,877	296,602	354,522	492,738	171,907
DI Yogyakarta	min	86,207	79,758	5,425	117,841	109,212	107,158	83,707
	max	284,103	288,264	255,172	421,047	434,780	465,809	447,555
Bali	min	14,244	25,431	5,288	21,508	20,513	33,854	21,796
	max	137,115	122,427	200,648	168,015	107,423	207,219	70,322

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Bali, yaitu hanya 5,288. Belanja ekonomi sebesar 5,288 ini merupakan belanja ekonomi perkapita Tabanan tahun 2016.

### Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Jawa-Bali

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Bali, yaitu sebesar 1.678,746. Angka tersebut merupakan belanja perlindungan sosial perkapita dari Kabupaten Bangli Provinsi Bali Tahun 2016.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di di DIY, yaitu hanya 1,198 Belanja perlindungan sosial sebesar 1,198 ini merupakan belanja perlindungan sosial perkapita Gunung Kidul tahun 2016.

Tabel 4.1.11. Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		В	Belanja Perli	ndungan So	sial per kap	ita		
Jawa Timur	min	5,173	8,679	1,460	9,630	11,244	5,144	3,289
	max	179,741	187,318	191,488	292,526	319,509	309,350	254,607
Jawa tengah	min	5,684	7,925	1,611	11,062	13,693	13,024	11,622
	max	63,913	62,458	93,566	90,929	100,653	106,250	108,473
Jawa Barat	min	8,006	7,964	1,899	2,592	2,870	5,517	5,327
	max	47,424	53,007	43,378	208,068	54,003	62,457	56,180
Banten	min	9,035	10,032	1,874	11,710	12,505	11,645	9,659
	max	99,383	69,343	76,915	96,412	104,379	90,479	75,897
DKI Jakarta	min	73,441	80,359	36,941	64,319	181,037	138,537	102,114
	max	73,441	80,359	36,941	64,319	181,037	138,537	102,114
DI Yogyakarta	min	16,382	14,617	1,198	7,861	10,119	18,032	13,782
	max	73,151	68,869	63,403	58,895	60,043	68,273	46,270
Bali	min	164,839	187,903	43,069	253,927	227,999	262,824	115,743
	max	1381,734	806,385	1678,746	1660,520	1042,940	462,015	418,666

### Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Jawa-Bali

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Bali, yaitu sebesar 8.828. Angka tersebut

merupakan belanja perumahan dan fasum perkapita dari Kabupaten Badung Provinsi Bali Tahun 2018.

Sebaliknya, belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang. Dimana Kabupaten Subang pada tahun 2020 tercatat tidak melakukan belanja untuk perumahan dan fasum atau belanja perumahan dan fasum Kabupaten Subang tahun 2020 sebesar 00,00.

Tabel 4.1.12. Deskripsi Input Belanja Perumahan & Fasilitas Umum Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali

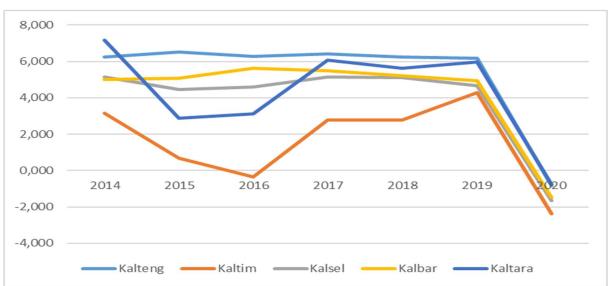
Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Belan	ja Perumaha	n & Fasilita	s Umum pe	r kapita		
Jawa Timur	min	67,920	78,966	11,970	75,287	3,259	3,784	7,045
	max	665,744	760,207	1148,899	962,853	1018,447	1330,833	916,618
Jawa tengah	min	97,100	102,200	8,681	134,898	132,360	136,314	59,483
	max	532,832	560,046	1066,270	718,672	806,482	744,524	586,014
Jawa Barat	min	55,524	59,088	2,115	59,548	63,639	116,915	0,000
	max	421,122	481,902	719,842	605,231	496,206	511,535	390,332
Banten	min	92,733	114,073	44,786	67,673	63,011	79,800	18,491
	max	680,481	539,249	777,742	782,612	1209,894	597,965	416,350
DKI Jakarta	min	608,107	701,839	1501,976	965,542	840,648	663,383	383,397
	max	608,107	701,839	1501,976	965,542	840,648	663,383	383,397
DI Yogyakarta	min	100,730	117,509	1,090	199,687	161,223	186,610	52,138
	max	331,997	331,212	446,098	410,179	361,853	457,784	285,523
Bali	min	763,393	895,694	1045,945	2151,713	1407,189	1623,782	1711,890
	max	5435,812	5000,052	6606,540	8413,266	8828,711	4352,772	5675,351

#### 4.1.3. KALIMANTAN

### 4.1.3.1 Output

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan output yang digunakan untuk mengukur efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kalimantan. Pergerakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan pada periode 2014-2020 masih didominasi oleh Kalimantan Tengah sebagai peraih nilai pertumbuhan tertinggi, meskipun pada tahun 2019 kondisi ekonomi memburuk karena adanya pandemic Covid-19 yang menghambat kegiatan ekonomi, namun penurunan pertumbuhan ekonominya masih lebih baik dibandingkan dengan daerah

lainnya di empat provinsi lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.



Grafik 4.1.15. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020

Kalimantan Utara merupakan Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Kalimantan, yaitu mencapai 7,184 persen. pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada tahun 2014 juga menjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Kalimantan. Kabupaten Nunukan dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 9,98 persen yang menjadikannya sebagai kabupaten dengan pertumbahan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014.

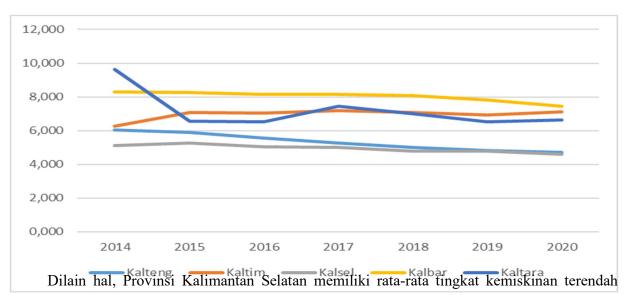
Pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara sebesar 8,16 persen. Hampir semua sektor ekonomi di Kalimantan Utara tahun 2013 mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 2013 – 2014 PDRB di Provinsi Kalimantan Utara cenderung meningkat , dengan nilai tertinggi di Kota Tarakan, yang berkontribusi sebesar 43,80 persen untuk perekonomian Kalimantan utara (Bappenas)

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota setiap provinsi di kawasan kalimantan mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terpuruk pada tahun 2020, yaitu mencapai -2,381. Pandemi

Covid-19 menjadi akar permasalahan terjadinya kemerosotan di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Dimana dampak Covid-19 ini hampir dirasakan oleh seluruh negara didunia.

Lebih lanjut, kondisi kemiskinan di Kabupaten/Kota pada kawasan Kalimantan secara umum menunjukkan tren penurunan bahkan ketika dimasa pandemi covid-19 berlangsung. Namun, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan pada tingkat kemiskinannya. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menyentuh angka 9,616. hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan kalimantan dan juga merupakan tingkat kemiskinan tertinggi sepanjangn tahun 2014-2020. Bulungan adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, yaitu sebesar 11,87 persen.

Grafik 4.1.16. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020



sepanjang tahun 2014-2020 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan kalimantan, dimana tingkat kemiskinan terendah berada pada tahun 2020 sebesar 4,584 persen. Kabupaten Banjar sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020, yaitu sebesar 2,55 persen.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.1.13. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Pertur	nbuhan Ek	conomi			
Kalteng	Min	4,200	5,160	5,120	5,180	5,120	4,960	-3,250
	Max	7,370	7,710	7,930	7,940	7,140	7,210	3,360
Kaltim	Min	-3,230	- <mark>7,170</mark>	-4,980	0,550	-4,080	-2,160	-4,440
	Max	0,686	5,940	4,920	4,290	5,400	7,990	-0,260
Kalsel	Min	3,190	2,410	2,620	2,920	3,130	3,170	-2,620
	Max	6,680	6,910	6,940	6,960	6,900	6,920	-0,670
Kalbar	Min	2,760	3,680	4,750	5,493	4,480	3,850	-3,970
	Max	6,620	6,350	<mark>7,970</mark>	7,210	7,830	6,720	0,700
Kaltara	Min	4,290	0,880	1,100	3,940	3,570	4,330	-0,960
	Max	9,980	4,890	5,930	7,960	7,500	7,630	-0,620
			Ting	kat Kemis	kinan			
Kalteng	Min	3,810	3,910	3,730	3,360	3,150	3,010	3,090
	Max	8,550	8,500	8,080	7,460	7,430	7,190	6,850
Kaltim	Min	2,460	2,910	2,810	2,820	2,640	2,420	2,570
	Max	7,093	10,500	10,650	11,290	11,620	11,250	11,440
Kalsel	Min	2,870	3,260	3,100	2,960	2,700	2,720	2,550
	Max	7,000	7,070	6,760	6,650	6,380	6,500	6,140
Kalbar	Min	4,470	4,570	4,510	8,167	4,520	4,570	4,420
	Max	13,710	13,510	12,630	12,540	12,830	12,380	12,040
Kaltara	Min	7,900	5,110	5,170	6,220	5,080	4,720	4,810
	Max	11,870	8,500	8,990	9,930	9,440	8,780	9,060

### Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kalimantan

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Kalimantan berada di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan sebesar persen 7,970 dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan Kalimantan sepanjang tahun 2014-2020.

Sebaliknya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar -7,170. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten tahun 2015 menjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan Kalimantan sepanjang tahun 2014-2020.

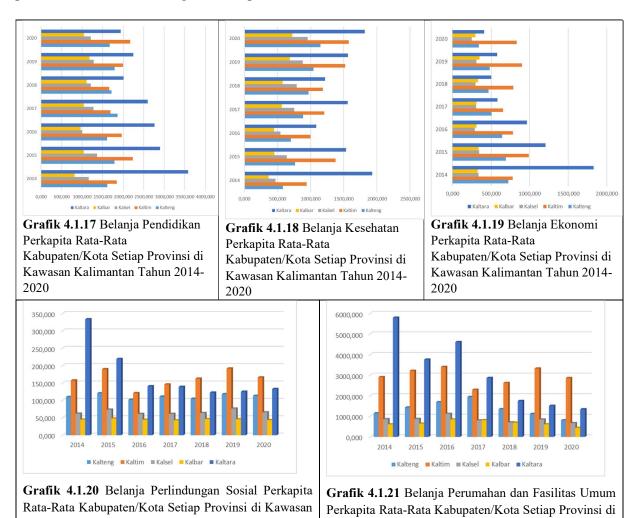
### Tingkat Kemiskinan Kawasan Kalimantan

Mempawah merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Kalimantan sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 13,710 persen pada tahun 2014. Sebaliknya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Kalimantan sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sebesar 2,420 persen di tahun 2019.

### 4.1.3.2 Input

Kalimantan Tahun 2014-2020

Variasi belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kalimantan untuk belanja di lima bidang tergolong beragam. Belanja bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan menjadi prioritas utama untuk sebagian besar pemerintah daerah.



Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020

Tabel 4.1.14. Deskripsi Input di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Bela	nja Pendidika	an Perkapita			
Kalteng	Min	729,416	874,848	146,306	916,737	913,182	1020,219	926,572
	Max	2239,921	2510,948	2570,268	4224,382	2486,166	2423,657	2369,175
Kaltim	Min	927,962	1159,511	547,528	799,258	782,523	827,158	738,511
	Max	2232,032	5115,185	7980,648	4810,398	4570,012	5358,133	7629,057
Kalsel	Min	779,631	814,779	15,887	713,604	683,579	716,819	664,724
	Max	1419,213	1828,784	1958,552	2029,358	2070,965	2048,911	2153,506
Kalbar	Min	3,732	737,748	186,825	1040,999	781,300	738,262	642,134
	Max	1230,654	1364,819	1404,436	1566,939	1610,188	1709,229	1498,025
Kaltara	Min	1590,151	1014,223	662,108	911,608	904,708	919,158	972,021
	Max	7927,590	5423,491	8250,685	5847,936	3095,360	3807,030	2793,176
			Bela	anja Kesehata	n Perkapita			
Kalteng	Min	208,640	306,056	116,332	369,585	405,138	376,747	497,286
	Max	951,489	1288,747	1385,364	2186,510	1773,173	1875,943	1756,261
Kaltim	Min	283,794	398,449	178,016	309,409	390,745	411,724	367,897
	Max	1376,638	4352,997	3687,117	4497,331	4089,480	5831,331	5577,358
Kalsel	Min	203,448	271,482	7,837	239,643	294,195	464,795	443,781
	Max	749,480	1010,161	1000,533	1178,963	1195,521	1488,616	1659,222
Kalbar	Min	135,071	200,263	79,343	562,345	206,887	310,636	249,697
	Max	638,280	689,231	795,461	867,858	1003,616	1101,373	1406,546
Kaltara	Min	707,304	346,179	444,851	237,739	260,643	291,288	441,076
	Max	3627,157	2558,923	2377,984	2924,294	2396,473	2715,895	2900,120
			Bela	nja Ekonom	i Perkapita			
Kalteng	Min	279,271	276,961	79,727	224,578	212,822	232,630	126,273
	Max	1882,697	1337,823	1804,920	1340,312	1310,075	808,982	694,582
Kaltim	Min	224,258	257,788	168,914	192,371	222,888	224,754	175,207
	Max	986,651	3117,697	4106,469	2813,137	3879,960	3928,217	3742,293
Kalsel	Min	114,100	105,092	2,980	94,258	98,048	120,113	118,253
	Max	550,483	646,438	664,013	919,377	927,167	945,444	841,704
Kalbar	Min	49,518	113,057	88,356	309,130	130,417	139,846	101,821
	Max	672,694	572,441	755,889	596,118	976,400	1064,138	892,752
Kaltara	Min	645,855	274,680	64,481	255,315	245,723	203,817	195,785
	Max	3523,629	2143,066	3174,260	907,969	850,349	930,525	619,263
			Belanja l	Perlindungan	Sosial Perkaj	oita		
Kalteng	Min	29,841	45,802	13,027	54,128	48,617	48,062	25,389
	Max	194,177	212,636	188,759	246,192	195,403	219,858	183,964
Kaltim	Min	29,873	42,348	21,055	33,286	35,354	43,114	37,015
	Max	190,189	690,065	484,725	758,204	815,218	859,494	725,724
Kalsel	Min	25,747	35,029	1,042	34,312	35,209	41,508	35,222
	Max	90,694	116,097	123,482	111,689	129,455	161,353	132,806

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Belanja l	Perlindungan	Sosial Perkaj	pita		
Kalbar	Min	4,418	29,167	7,785	42,826	11,455	21,728	18,844
	Max	64,726	67,092	79,469	81,848	91,287	88,959	69,572
Kaltara	Min	133,709	62,927	57,268	59,423	54,573	51,784	62,489
	Max	640,967	423,636	298,037	222,493	207,711	196,713	246,611
		В	elanja Perum	ahan dan Fas	ilitas Umum	Perkapita		
Kalteng	Min	317,660	366,097	417,449	298,398	333,097	480,068	272,637
	Max	3406,089	3736,823	5440,943	7777,692	3154,881	2161,199	1414,766
Kaltim	Min	1566,506	952,435	206,004	462,506	631,505	881,510	545,371
	Max	3213,775	10787,116	23268,509	11977,710	12707,763	11162,318	13107,034
Kalsel	Min	282,774	322,606	1,332	288,176	252,397	404,340	169,750
	Max	1380,847	1872,804	2314,157	2187,985	1684,160	1943,346	1409,867
Kalbar	Min	10,060	249,618	179,109	815,996	102,977	103,133	169,765
	Max	1166,409	1156,610	1897,365	1658,855	1351,016	1081,305	876,847
Kaltara	Min	1411,642	705,831	631,053	707,266	819,562	411,321	434,200
	Max	14278,088	9653,266	17632,304	8522,911	3864,166	3487,606	2995,641

Belanja pendidikan per kapita, belanja kesehatan perkapita, dan belanja ekonomi perkapita pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara selalu berada di peringkat pertama atau dalam artian belanja untuk ke 3 fungsi selalu menunjukkan nilai tertinggi jika di bandingkan dengan provinsi lain di kawasan Kalimatan sepanjang tahun 214-2020. Begitu juga 2 fungsi lainnya, yaitu belanja perlindungan sosial perkapita dan belanja perumahan & fasilitas umum perkapita pada tahun 2014 tercatat paling tinggi nilainya berada di Provinsi Kalimantan Utara.

Alokasi dan realisasi belanja daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 s.d. 2020. Relatif tingginya pagu dan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan menunjukkan bahwa fokus pemerintah daerah pada periode tersebut adalah untuk meningkatan kualitas pendidikan yang diantaranya dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan di sekolah (DJPb Kaltara, 2021).

Besaran belanja pemerintah untuk layanan pokok berupa pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, dan perumahan dan fasilitas umum di Kabupaten/Kota di Kawasan Kalimantan memperlihatkan komposisi yang semakin bertambah porsinya. Untuk bidang Pendidikan, Batasan perundangan memberikan mandat untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara untuk bidang Kesehatan,

minimal belanja pemerintah sebesar 5 persen dari APBD. Belanja pemerintah bidang perlindungan sosial minimal alokasi adalah sebesar 10 persen dari APBD.

### Belanja Pendidikan Kawasan Kalimantan

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan kalimantan berada di Kalimantan Utara, yaitu sebesar 8.250,685. Angka tersebut merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja pendidikan perkapita perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu hanya 15,887. Belanja pendidikan sebesar 15,887 ini merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016.

### Belanja Kesehatan Kawasan Kalimantan

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan kalimantan berada di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 5.832,331. Angka tersebut merupakan belanja kesehatan perkapita dari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu hanya 17,837. Belanja kesehatan sebesar 17,837 ini merupakan belanja kesehatan perkapita Banjarmasin tahun 2016.

### Belanja Ekonomi Kawasan Kalimantan

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan kalimantan berada di Kalimantan Timur, yaitu sebesar. 4.106,469 Angka tersebut merupakan belanja ekonomi perkapita dari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu hanya 2,980. Belanja ekonomi sebesar 2,980 ini merupakan belanja ekonomi perkapita Banjarmasin tahun 2016.

### Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Kalimantan

Belanja perlidungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 859,494. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan, yaitu hanya 1,042. Belanja perlindungan sosial sebesar 1,042 ini merupakan belanja perlindungan sosial perkapita Banjarmasin tahun 2016.

### Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Kalimantan

Belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 14.278,088. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014.

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu hanya 1,332. Belanja perumahan dan fasum perkapita sebesar 1,332 ini merupakan belanja perumahan dan fasum perkapita Banjarmasin tahun 2016.

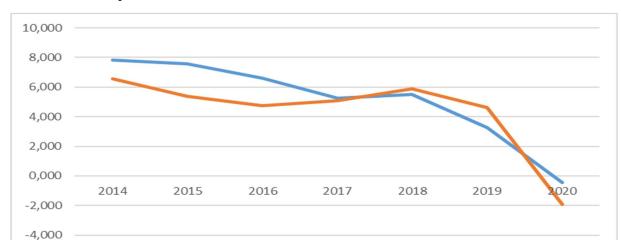
Dari semua Provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin untuk 4 jenis belanja pemerintah (ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, dan perumahan & fasilitas umum) selalu berada di angka paling rendah. Sebaliknya, Kalimantan Timur, khususnya Mahakam Ulu memiliki porsi belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi tertinggi sepanjang tahun 2014-2020.

#### **4.1.4. PAPUA**

### 4.1.4.1. Output

Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada tahun 2014 paling tinggi sepanjang 2014-2020 dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di kawasan Papua, yaitu sebesar 7,815 persen. Kabupaten Deiyai dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 11,52

menjadikannya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Papua tahun 2014.



Grafik 4.1.22. Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020

Sebaliknya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat merosot sampai menyentuh angka -1,932 persen. Tidak bisa dipungkiri pada tahun 2020 seluruh provinsi di kawasan Papua mengalami kemerosotan yang tajam. Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Papua Barat tahun 2020, yaitu sebesar -4,86.

Papua Barat

Papua

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), secara umum pertumbuhan ekonomi Papua dan Papua Barat selama tahun 2020 memiliki pola yang hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, Papua mengalami kontraksi ekonomi sebesar -15,72 persen, disebabkan oleh turunnya produksi Pertambangan dan Penggalian sebesar 43,21 persen yang mengakibatkan turunnya Ekspor Luar Negeri sebesar 69,10 persen.

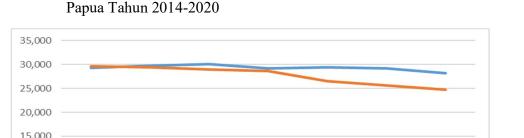
Pertumbuhan ekonomi Papua sangat tergantung pada sektor pertambangan. Disini terlihat, jika disertakan sektor pertambangan maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua hanya 2,74%, akibat adanya tekanan di tahun 2019. Sedangkan tanpa sektor pertambangan rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua mencapai 6,36% per tahun, yang cenderung juga melambat tapi masih dikisaran positip yang cukup tinggi.

Struktur ekonomi Papua dikuasai oleh sektor-sektor yang ekstratif. Khususnya sektor pertambangan yang menguasai sepertiga PDRB wilayah Papua yaitu 39,55% per tahun, dan sektor pertanian sebesar 11,32% per tahun selama periode 2014-2019.

Perekonomian Papua terkonsentrasi. Kabupaten Mimika, Jayapura, Merauke dan Kota Jayapura memiliki andil yang paling besar terhadap total PDRB se Papua, keempatnya kurang lebih 65,33% jika dengan sektor tambang, dan 54,37% tanpa sektor tambang. Adanya konsentrasi ekonomi tersebut juga mengindikasikan telah terjadi Aglomerasi Ekonomi di Papua (Bappeda Prov Papua, 2020).

Provinsi Papua meski sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus, namun belum mampu mendongkrak wilayah ini keluar dari angka kemiskinan yang relative tinggi disbanding dengan Provinsi lainnya di Indosesia. Provinsi Papua jika dilihat dari grafik 4.1.23, merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan rata-rata Kabupaten/Kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di kawasan Papua, yaitu sebesar 30,056 persen pada tahun 2016. Deiyai merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Papua tahun 2016, yaitu sampai menyentuh angka 45,11 persen.

Sebaliknya, Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata tingkat kemiskinan paling rendah jika dibandingkan Provinsi lain di Kawasan Papua, yaitu sebesar 24,788 persen. Kabupaten Sorong menjadi kabuaten dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2020 di Papua Barat, yaitu sebesar 14,99.



2017

- Papua Barat

2018

2019

2020

5,000

2014

2015

2016

Papua

Grafik 4.1.23. Tingkat Kemiskinan Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Panua Tahun 2014-2020

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Papua dan Papua Barat menduduki urutan pertama dan kedua provinsi dengan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Namun demikian, provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin maupun miskin ekstrem terbanyak di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kondisi kemiskinan di Papua dan Papua Barat ini diperparah dengan tingginya tingkat ketimpangan (rasio gini) yang melebihi angka nasional. Memperhatikan sebaran lokasi tempat tinggal, 95 persen penduduk miskin di Papua dan 88 persen penduduk miskin di Papua Barat tinggal di daerah perdesaan.

Mayoritas penduduk miskin di Papua dan Papua Barat bekerja di sektor pertanian. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan penduduk miskin di Papua dan Papua Barat lebih besar daripada penduduk tidak miskin. Kemiskinan di Papua cenderung menurun. Selama periode 2014-2019 misalkan rata-rata mengalami penurunan -0.05% per tahun, sehingga di tahun 2019 tingkat kemiskinan di Papua tercatat 27,53%, dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 540,10 ribu.

Kesenjangan Terhadap Garis Kemiskinan (P1) dan Ketimpangan Pengeluaran (P2) Semakin Mengecil. Meskipun garis kemiskinan cenderung meningkat, namun berkat adanya berbagai kebijakan *pro poor and equity*, pemerintah Papua berhasil menekan kesenjangan P1 hingga menurun -0,41% per tahun, dan ketimpangan P2 sebesar -0,30% selama tahun 2014-2019.

Sebagian besar kantong kemiskinan Papua berada di daerah pegunungan yang sulit akses. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar menjadi penyebab utama kantong kemiskinan paling banyak di daerah-daerah pegunungan, dimana tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Deyiai sebesar 43,65% dan Intan Jaya sebesar 42,92% (Bappeda Prov Papua, 2020).

Tabel 4.1.15. Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Papua tahun 2014-2020

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	Pertumbuhan Ekonomi										
Papua	Min	-0,550	4,250	4,060	-4,570	0,420	-38,520	-4,890			
	Max	11,520	12,870	13,510	7,720	10,270	7,570	11,550			
Papua Barat	Min	2,430	1,970	0,890	-0,010	4,010	2,050	-4,860			
	Max	12,100	10,270	9,050	8,260	10,620	6,780	4,770			
			Tingk	at Kemisk	inan						
Papua	Min	10,200	11,100	11,080	10,810	10,540	10,350	10,030			
	Max	44,490	45,740	45,110	43,630	43,490	43,650	41,760			
Papua Barat	Min	17,650	17,560	17,440	17,220	15,850	15,450	14,990			
	Max	38,920	38,530	39,460	39,230	35,720	34,830	33,810			

## Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Papua berada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dengan pertumbuhan sebesar 13,520 persen pada tahun 2016 dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020.

Sebaliknya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua tahun 2019 sebesar -38,520. Pertumbuhan ekonomi Mimika tahun 2020 menjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020.

### Tingkat Kemiskinan Kawasan Papua

Deiyai merupakan kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 45,740 persen di tahun 2015. Sebaliknya Kabupaten Merauke Provinsi Papua pada tahun 2020 memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sebesar 10,030 persen.

### 4.1.4.2 Input

Belanja pada Lima bidang pilihan yaitu belanja Pendidikan, belanja Kesehatan, belanja ekonomi, belanja perlindungan sosial, dan belanja perumahan dan fasilitas umum merupakan kegiatan pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dasar untuk masyarakat. Dengan alokasi pembiayaan di bidang ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan belanja di lima bidang ini merupakan komponen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan produktivitas dan kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan daya saing daerah.

Grafik 4.1.24 hingga 4.1.28 menunjukkan variabel input dalam bentuk belanja pemerintah perkapita, yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, belanja perlindungan sosial,dan belanja perumahan dan Fasilitas umum. Dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki rata-rata belanja pemerintah yang tinggi untuk 5 jenis belanja pemerintah tersebut.



Selanjutnya, diuraikan secara lebih spesifik besaran dari belanja pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Papua. Angka yang tertera pada tabel 4.1.16 memperlihatkan besaran anggaran yang dilaokasikan oleh masing-masing pemerintah daerah pada klasifikasi belanja bidang. Secara umum, setiap tahunnya terjadi penambahan anggaran untuk setiap belanja yang dialokasikan secara proporsional di kelima bidang pengeluaran pemerintah tersebut.

Tabel 4.1.16. Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Papua tahun 2014-2020

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Belan	ja Pendidikan	Perkapita			
Papua	Min	350,366	548,625	224,334	410,157	441,619	519,840	404,218
\$40.40 miles	Max	4731,583	4432,543	3887,557	4035, 174	4522,450	3907,880	5224,181
Papua Barat	Min	569,373	892,880	193,153	786, 290	743,369	835, 368	777,726
	Max	7206,068	6424,732	5294,396	6219,896	7811,702	8995, 733	7527,555
			Belar	nja Kese hatan	Perkapita			
Papua	Min	311,795	336,506	208,869	339, 923	413,395	412,740	566,799
ñ:	Max	4334,548	4036, 404	3255,933	4145, 364	3995,501	4326, 262	6622,130
Papua Barat	Min	374,455	648,535	99,202	844,826	752,349	987, 366	535,324
W 70	Max	3577,249	4523, 128	4374,221	2967,912	7947,261	9488, 100	7290,007
			Bela	nja Ekonomi F	Perkapita			
Papua	Min	238,253	288, 256	134,662	231, 401	271,258	219,884	168,780
-	Max	5197,381	4901, 428	4501,129	3844, 142	5052,415	3568, 369	6602,351
Papua Barat	Min	182,011	213, 144	80,951	258, 354	196,574	187,920	169,593
	Max	5958,893	5649,003	8178,852	4936, 116	4196,726	4647,750	3642,789
			Belanja Pe	erlindungan S	osial Perkapita	a		
Papua	Min	54,161	82, 157	9,733	76,490	74,059	65,849	63,370
	Max	1076,079	990,779	3255,933	3255,933	3255,933	3255, 933	835,135
Papua Barat	Min	49,999	77,581	25,900	88, 171	107,233	72,636	59,014
- No.	Max	1378,659	1228,888	2327,765	1619,884	1710,618	2093, 556	2018,032
		Be	lanja Peruma	han dan Fasili	tas Umum Per	rkapita		
Papua	Min	342,781	467,887	350,304	252,943	420,695	0,000	0,000
y:	Max	9079,571	9663,635	5236,246	5384,049	7027,911	5853, 183	4382,983
Papua Barat	Min	547,896	600,544	322,734	626,633	694,894	888, 504	170,972
Ai:	Max	12701,593	18354,873	18407,280	11302, 200	12081,853	23027, 428	17688,090

### Belanja Pendidikan Kawasan Papua

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Papua berada di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8995,733. Angka tersebut merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Tambrauw pada tahun 2019.

Sebaliknya, belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua barat pada tahun 2016, yaitu hanya yang 193,153. Belanja pendidikan sebesar ini merupakan belanja pendidikan perkapita Kabupaten Kaimana tahun 2016.

### Belanja Kesehatan Kawasan Papua

Belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Papua berada di Papua Barat, yaitu sebesar 9488,1. Angka tersebut merupakan belanja kesehatan perkapita dari Kabupaten Tambrauw pada tahun 2019.

Sebaliknya, belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua Barat pada tahun 2016, yaitu hanya 99,202. Belanja kesehatan sebesar ini merupakan belanja kesehatan perkapita Kabupaten Kaimana.

### Belanja Ekonomi Kawasan Papua

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Papua berada di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8178,852. Angka tersebut merupakan belanja ekonomi perkapita dari Kabupaten Tambrauw pada tahun 2016.

Sebaliknya, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua Barat pada tahun 2016, yaitu hanya 80,951. Belanja ekonomi sebesar ini merupakan belanja ekonomi perkapita Kaimana tahun 2016.

### Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Papua

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Papua berada di Provinsi Papua, yaitu sebesar 3255,933 pada tahun 2016-2019. Angka tersebut merupakan belanja perlindungan sosial perkapita dari Kabupaten Mamberamray Provinsi tahun 2016-2019.

Sebaliknya, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua Barat, yaitu hanya 25,9 Belanja perlindungan sosial sebesar ini merupakan belanja perlindungan sosial perkapita Kaimana tahun 2016.

### Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Papua

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Papua berada di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 18407,28. Angka tersebut merupakan belanja perumahan dan fasum perkapita dari Kabupaten Tambrauw tahun 2016.

Sebaliknya, belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua tahun 2019-2020, yaitu Kabupaten mimika dan Paniai. Dimana pada 2 Kabupaten ini tercatat tidak melakukan belanja untuk perumahan dan fasum atau sebesar 00,00.

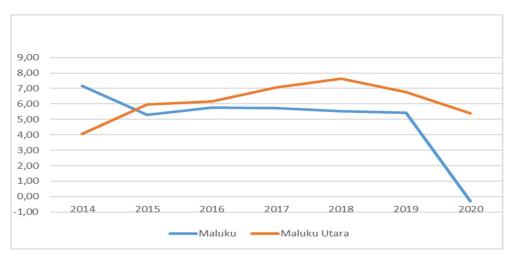
#### **4.1.5. MALUKU**

### 4.1.4.1. Output

Capaian pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dua indikator ini merupakan cerminan penting dari proses pembangunan yang dilakukan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan adanya kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Sementara kemiskinan memperlihatkan kondisi individua tau rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kebutuhan hidup dasar. Kemiskinan dapat menjadi hambatan sosial karena akan mendorong terjadinya tindak kejahatan dan adanya Batasan dalam interaksi dan komunikasi antara masyarakat golongan atas dan bawah akibat adanya stratifikasi sosial yang muncul.

Maluku Utara merupakan Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Maluku, yaitu mencapai 7,64 persen. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2018 menjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Maluku. Kabupaten Halmahera Selatan dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 15,44 persen yang menjadikannya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018.





Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota setiap provinsi di kawasan Maluku mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terpuruk pada tahun 2020, yaitu mencapai –0,29. Ambon menjadi Kabupaten dengan Pertumbuhan Ekonomi rata-rata terendah di Provinsi Maluku pada tahun 2020, yaitu sebesar -1,95. Pandemi Covid-19 menjadi akar permasalahan terjadinya kemerosotan di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Dimana dampak Covid-19 ini hampir dirasakan oleh seluruh negara didunia.

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya kegiatan produksi masyarakat, sehingga menyebabkan penurunan PDRB di Provinsi Maluku di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Namun demikian, dengan adanya Program PEN dari pemerintah pusat, PDRB Provinsi Maluku semakin meningkat pada tiap triwulan. Data pertumbuhan ekonomi disajikan dalam laju pertumbuhan PDRB, nominal PDRB dan PDRB perkapita. Berikut adalah data dan analisis realisasi PDRB di Provinsi Maluku pada tahun 2020.

Adanya penurunan hasil produksi di Provinsi Maluku akibat pandemi COVID-19 selama tahun 2020, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2019 saat kondisi normal, realisasi PDRB Provinsi Maluku di tahun 2020 mengalami penurunan. Selain itu, kondisi ini juga jauh dari target yang telah ditetapkanndalam RPJMD Maluku sebesar 6,43% (DJPb Maluku, 2020). Tingkat konsumsi masyarakat selalu menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun regional (DPJb Maluku Utara, 2020).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada Kawasan Maluku relatif tidak banyak mengalami perubahan, bahkan di tahun 2020 malah mengalami penurunan untuk wilayah Maluku Utara. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Maluku menyentuh angka 22,71. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan Maluku dan juga merupakan tingkat kemiskinan tertinggi sepanjang tahun 2014-2020. Maluku Barat Daya adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku pada tahun 2016, yaitu sebesar 31,01 persen.

Dilain hal, Provinsi Maluku Utara memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah sepanjang tahun 2014-2020 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Maluku, dimana tingkat kemiskinan terendah berada pada tahun 2020 sebesar 7,96 persen. Kabupaten Ternate sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi Maluku Utara pada tahun 2020, yaitu sebesar 3,46 persen.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Ekonom Provinsi Maluku, salah satu faktor dalamnya tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku adalah karena barang yang dijual sebagian besar adalah barang mentah sehingga untung yang didapat kecil dan sulit untuk berproduksi secara kontinu.

Selain itu, penyebab tingginya kemiskinan di Provinsi Maluku antara lain karena Perekonomian Maluku masih mengandalkan APBN dan APBD sebagai pendorong utama, infrastruktur yang belum memadai, konektivitas antar pulau yang belum baik, dan investasi yang rendah. Selain itu, kebijkanan penutupan beberapa jalur transportasi menyebabkan warga desa kesulitan untuk menjual hasil kebun dan hasil tangkapan ikan. Pemerintah Daerah di Provinsi Malukutelah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya dengan optimalisasi pelaksanaan program PEN di Provinsi Maluku, memberikan pinjaman dengan bunga rendah melalui Bank MalukuMalut dengan sasaran utama ASN dan UMKM, serta dengan pembentukan Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Maluku (DJPb Prov Maluku, 2020).

Tabel 4.1.17. Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 2014-2020

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	Pertumbuhan ekonomi										
Maluku min 5,91 1,25 5,03 3,34 0,38 1 -1											
	max	13,46	6,77	6,18	6,17	6,22	6,06	-0,01			
Maluku Utara	min	-9,66	4,34	4,03	4,83	2,41	2,97	-0,85			
	max	8,76	8,09	11,24	16,06	15,44	12,46	31,32			
			Tingkat I	Kemiski	nan						
Maluku	min	4,23	4,38	4,64	4,46	4,72	4,57	4,51			
	max	28,33	31,58	31,01	30,18	30,2	29,43	29,15			
Maluku Utara	min	3,16	2,99	2,67	2,73	3	3,14	3,46			
	max	16,88	15,33	27,44	27,44	27,44	27,44	15,45			

Berdasarkan tipologinya, selama periode 3 tahun terakhir (2017-2019) tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara di pedesaan mencapai kisaran 7 persen, dan tingkat kemiskinan di perkotaan pada kisaran 3 sampai 5 persen. Per September 2020, tingkat kemiskinan di perkotaan

dan perdesaan naik dibandingkan periode sebelumnya. Melihat kondisi itu, seharusnya program Dana Desa dapat digunakan di wilayah pedesaan dalam rangka investasi ekonomi yang bersifat produktif maupun investasi manusia di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan sosial lainnya. Selain itu, pengentasan kemiskinan yang digalakkan pemerintah daerah harus bermula dari pedesaan untuk menstimulus kesejahteraan masyarakat desa melalui penyaluran Dana Desa (DPJb Maluku Utara, 2020).

#### Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Maluku

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Maluku berada di Kabupaten Halmahera Teng Provinsi Maluku Utara dengan pertumbuhan sebesar 31,32 persen dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan Maluku Utara sepanjang tahun 2014-2020.

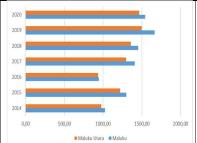
Sebaliknya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tahun 2015 sebesar -9,66. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ini menjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan Maluku sepanjang tahun 2014-2020.

#### Tingkat Kemiskinan Kawasan Maluku

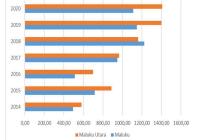
Maluku Barat Daya merupakan kabupaten di Provinsi Maluku yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Maluku sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 31,58 persen pada tahun 2015. Sebaliknya Ternate Provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Maluku sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sebesar 2,67 persen di tahun 2016.

### 4.1.4.1. Input

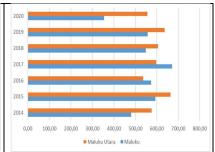
Belanja pendidikan per kapita, belanja kesehatan perkapita, dan Perumhan dan Fasilitas Umum perkapita di Provinsi Maluku Utara selalu berada di peringkat pertama atau dalam artian belanja untuk ke 3 fungsi selalu menunjukkan nilai tertinggi jika di bandingkan dengan provinsi lain di kawasan Kalimatan sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya 2 fungsi lainnya, yaitu belanja Ekonomi dan Perlindungan sosial perkapita tertinggi berada di Provinsi Maluku.



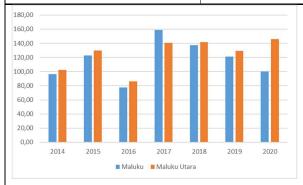
**Grafik 4.1.30** Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020



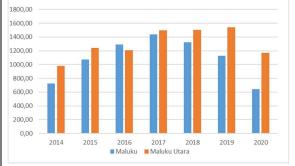
**Grafik 4.1.31** Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020



**Grafik 4.1.32** Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020



**Grafik 4.1.33** Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020



**Grafik 4.1.34** Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020

Tabel 4.1.18. Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 2014-2020

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		В	elanja Per	ndidikan p	er kapita			
Maluku	min	630,42	1054,95	153,84	652,03	820,08	815,12	780,13
	max	1453,66	1688,93	2242,23	2435,23	2500,70	2568,87	2046,92
Maluku Utara	min	379,52	471,03	54,89	588,95	612,47	638,65	538,55
-	max	2032,78	1950,23	1938,63	2111,45	2036,78	2419,41	2789,98
		- I	Belanja Ke	sehatan p	er kapita			111
Maluku	min	1.28,30	186,07	153,12	185,98	205,74	252,69	254,23
5 4	max	897,95	1221,77	1302,42	1821,21	2603,01	1845,92	1758,35
Maluku Utara	min	225,05	305,77	190,52	345,66	356,39	386,87	367,88
	max	892,14	1622,37	1420,04	1587,29	2066,92	2764,11	2414,83
	XII O	A 151 HA	Belanja El	konomi pe	r kapita		161 +01	
Maluku	min	123,12	157,60	146,77	181,32	156,94	146,70	111,35
ia i	max	835,24	993,11	1605,38	1439,59	921,03	935,74	614,52
Maluku Utara	min	161,88	380,37	55,94	287,20	291,85	302,26	152,67
	max	1460,79	1227,87	1201,63	931,52	888,39	1312,40	1112,08
	100 T	Belan	ja Perlind	ungan Sos	ial per kap	oita		
Maluku	min	30,07	40,97	21,28	52,77	48,01	41,04	35,41
	max	179,58	229,00	179,47	331,81	321,45	230,88	198,45
Maluku Utara	min	24,15	59,89	13,57	68,47	64,41	73,91	49,36
73	max	243,64	232,34	174,72	189,19	178,38	181,99	435,16
	E	Belanja Per	umahan d	lan Fasilita	s Umum p	er kapita		
Maluku	min	224,26	305,19	170,33	334,65	328,18	349,07	256,62
	max	1295,07	1673,57	3014,55	3174,27	2907,12	2702,72	1078,64
Maluku Utara	min	361,56	475,03	168,42	649,69	591,91	648,62	390,87
	max	3108,13	2495,21	2544,86	2832,11	3467,00	3189,45	2826,78

## Belanja Pendidikan Kawasan Maluku

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Maluku berada di Maluku Utara, yaitu sebesar 2789,98. Angka tersebut merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Halmahera Teng tahun 2020.

Sebaliknya, belanja pendidikan perkapita perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Maluku sepenjang tahun 2014-2020 ada di Maluku Utara, yaitu hanya 170,33. Belanja pendidikan sebesar ini merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016.

### Belanja Kesehatan Kawasan Maluku

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 2603,01. Angka tersebut merupakan belanja kesehatan perkapita dari Kabupaten Burusel tahun 2018.

Sebaliknya, belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Maluku sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Maluku, yaitu hanya 128,30. Belanja kesehatan sebesar ini merupakan belanja kesehatan perkapita Ambon tahun 2014.

### Belanja Ekonomi Kawasan Maluku

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 1605,38. Angka tersebut merupakan belanja ekonomi perkapita dari Kabupaten Burusel tahun 2016.

Sebaliknya, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Maluku sepenjang tahun 2014-2020 ada di Maluku Utara, yaitu hanya 55,94. Belanja ekonomi sebesar ini merupakan belanja ekonomi perkapita Halmahera Utara tahun 2016.

### Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Maluku

Belanja perlidungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 453,16. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Pulau Morontai tahun 2020.

Sebaliknya, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Maluku sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Maluku, yaitu hanya 21,28. Belanja perlindungan sosial sebesar ini merupakan belanja perlindungan sosial perkapita Serambangbar tahun 2016.

### Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Maluku

Belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 3467. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Pulau Tallabu tahun 2018.

Sebaliknya, belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Maluku, yaitu hanya 170,33. Belanja

perumahan dan fasum perkapita sebesar ini merupakan belanja perumahan dan fasum perkapita Kabupaten Serambagbar tahun 2016.

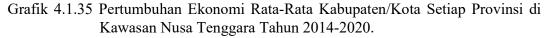
#### 4.1.5. NUSA TENGGARA

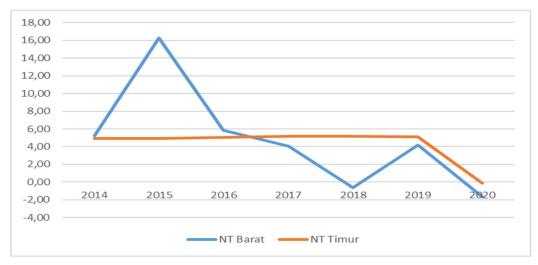
### 4.1.5.1. Output

### > Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kawasan Nusa Tenggara

Pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota tertinggi di Kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 terdapat di Provinsi NTB tahun 2015, yaitu sebesar 16,25 persen. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB pada tahun 2015, yaitu sebesar 107,07 persen.

Sebaliknya NTB pada tahun 2020 menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi ratarata kabupaten/kota terendah di kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020, yaitu menyentuh angka -1,68 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah di Provinsi NTB berada di Kabupaten Lombok Utara, yaitu sebesar -7,44 persen.



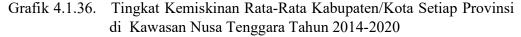


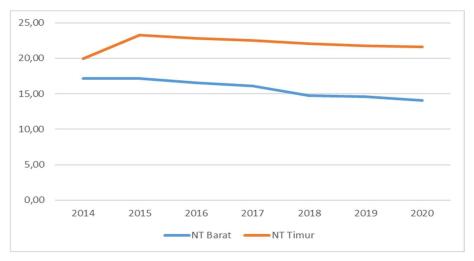
Pandemi yang mulai terjadi di akhir Maret 2020 berimbas pada beberapa lapangan usaha, utamanya yang berbasis pariwisata. Bantuan sosial yang telah digulirkan pemerintah dengan berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nyatanya belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020. Belajar dari kondisi pada tahun 2018, resesi yang terjadi

nyatanya tidak mengakibatkan Provinsi NTB terpuruk walaupun latar belakang resesi kala itu didominasi oleh melemahnya pertambangan. Pada resesi 2020, pertambangan justru menggeliat dan membantu NTB dari resesi yang lebih dalam (DJPb NTB,2020).

### ➤ Tingkat Kemiskinan Rata-Rata di Kawasan Nusa Tenggara

Tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di Kawasan Nusa Tenggara terdapat di Provinsi NTT, dimana tingkat kemiskinannya mencapai 23,31 persen pada tahun 2015. Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi NTB pada tahun 2020, dimana tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kotanya hanya 14,04 persen. Kota Bima menjadi Kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi NTB pada tahun 2020, yaitu sebesar 8,35 persen.





Secara umum, Provinsi NTT berada pada posisi ke 3 terbanyak persentase penduduk miskinnya sedangkan NTB berada pada urutan ke 8. Adapun Provinsi Bali menempati posisi penduduk miskin terendah di Bali-Nusra maupun Indonesia. Seluruh provinsi terdampak pandemi Covid-19, dan bantuan sosial menjadi jurus jitu untuk membantu menekan laju kemiskinan (DJPb NTB, 2020).

Tabel 4.1.19. Statistik Deskriptif Output Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara

	Provinsi 2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Pertumbuhan ekonomi									
NTB	min	-1,31	4,87	5,19	-19,41	-34,57	-1,17	-7,44		
	max	8,1	107,07	8,01	8,07	4,95	5,88	28,78		
NTT	min	4,02	4,39	4,45	4,49	4,74	4,31	-2,05		
	max	6,81	6,63	6,74	6,83	6,59	6,03	0,97		
	Tingkat Kemiskinan									
NTB	min	9,74	9,85	9,51	9,27	8,79	8,6	8,35		
	max	34,27	34,13	33,21	32,06	28,83	29,03	26,99		
NTT	min	7,83	9,66	9,97	9,81	9,61	9,22	8,96		
	max	31,4	36,22	36,55	36,01	34,85	34,62	34,49		

### Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Nusa Tenggara

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Nusa Tenggara berada di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB dengan pertumbuhan sebesar 107,07 persen dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi rata-rata tetinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebesar -34,57.

### Tingkat Kemiskinan di Kawasan Nusa Tenggara

Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten di Provinsi NTT yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 36,55 persen pada tahun 2016. Sebaliknya Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sebesar 7,83 persen di tahun 2014.

### 4.1.5.2. Input

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui kebijakan anggaran atau belanja pemerintah. Input yang digunakan meliputi lima bidang belanja yang mengarah secara langsung pada pelayanan masyarakat. Aspek belanja pemerintah pada lima bidang dasar ini ditargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada

Kawasan Nusa Tenggara. Secara komposisi belanja di kelima bidang bervariasi dengan dominasi belanja yang lebih besar untuk belanja Perumahan & Fasilitas Umum.



### Belanja Pendidikan Perkapita Kawasan Nusa Tenggara

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Nusa Tenggara berada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 1526,62. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Sumba Barat tahun 2018.

Sebaliknya, belanja perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di NTT, tepatnya di Kabupaten Kupang. Dimana pada tahun 2016, sebesar 60,77.

# Belanja Kesehatan Perkapita Kawasan Nusa Tenggara

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Nusa Tenggara berada di Provinsi NTB, yaitu sebesar 967,53 . Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017.

Sebaliknya, belanja perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 36,64. Dimana angka ini merupakan belanja dari Kabupaten Kupang tahun 2016.

Tabel 4.1.20. Statistik Deskriptif Input Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Pendidikan per kapita									
NTB	min	169,71	222,78	66,66	276,55	340,20	356,15	409,25	
	max	520,72	559,34	1068,83	869,01	991,07	1119,68	1007,23	
NTT	min	171,80	253,49	60,77	360,50	343,93	310,71	386,00	
	max	717,66	874,56	909,17	1091,61	1526,62	1318,52	1433,22	
Belanja Kesehatan per kapita									
NTB	min	90,85	106,17	55,32	98,73	112,08	111,45	94,95	
	max	524,55	522,13	810,62	967,53	798,13	649,85	621,78	
NTT	min	109,80	152,13	36,64	99,58	90,45	139,78	70,23	
	max	784,47	785,02	599,22	530,24	532,65	508,78	399,98	
Belanja Ekonomi per kapita									
NTB	min	16,23	19,53	11,22	26,14	23,87	21,87	19,77	
	max	107,98	101,40	117,45	167,48	187,19	166,29	152,46	
NTT	min	23,49	27,05	3,89	25,02	21,16	25,04	19,56	
	max	125,47	136,79	164,63	152,66	151,32	144,86	144,26	
Belanja Perlindungan Sosial per kapita									
NTB	min	107,44	179,00	205,05	275,18	177,83	233,63	167,65	
	max	1036,41	1217,03	1814,35	2863,56	2147,21	1346,28	593,70	
NTT	min	122,51	208,20	107,10	313,55	241,86	245,73	74,56	
	max	954,84	1465,36	1219,64	1590,28	1325,01	1279,56	865,46	
Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum per kapita									
NTB	min	635,80	671,78	794,20	2057,34	990,32	1095,80	1343,94	
	max	12354,46	3292,43	3345,29	9692,01	3620,51	3544,43	4058,81	
NTT	min	548,17	0	1054,64	1702,35	1266,06	1359,37	1241,99	
	max	9273,30	8125,51	6308,14	7540,71	6224,55	5971,54	4978,76	

### Belanja Ekonomi Perkapita Kawasan Nusa Tenggara

Belanja Ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Nusa Tenggara berada di NTB, yaitu sebesar 187,19. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018.

Sebaliknya, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 3,89. Dimana angka ini merupakan belanja dari Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016

# Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Kawasan Nusa Tenggara

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Nusa Tenggara berada di NTB, yaitu sebesar 2863,56. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Sebaliknya, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 74,56. Dimana angkan ini merupakan belanja Kabupaten Sikka tahun 2020.

### Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Kawasan Nusa Tenggara

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Nusa Tenggara berada NTB, yaitu sebesar 12354,46. Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Lombok Utara tahun 2014.

Sebaliknya, belanja perumahan dan fasilitas umum perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, tepatnya di Manggarai Barat. Dimana pada tahun 2015, tercatat di Manggarai Barat tidak terdapat belanja dalam bidang perumahan dan fasilitas umum.

#### **4.1.5. SULAWESI**

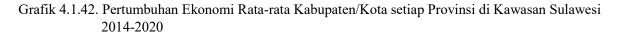
#### 4.1.5.1. Output

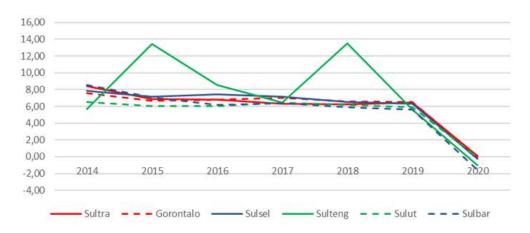
Pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota tertinggi di Kawasan Sulawesi sepanjang tahun 2014-2020 terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018, yaitu sebesar 13,75 persen.

Sebaliknya Sulawesi Barat pada tahun 2020 menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi ratarata kabupaten/kota terendah, yaitu menyentuh angka -1,8 persen.

Tabel 4.1.21. Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertumbuhan ekonomi									
Gorontalo	min	7,18	6,08	6,29	6,66	6,20	6,22	-0,21	
	max	7,93	7,30	7,41	7,43	7,00	6,95	0,06	
Sulsel	min	4,73	5,11	1,58	3,07	1,08	1,17	-10,87	
	max	10,41	8,83	9,61	8,41	8,91	10,75	2,19	
Sulteng	min	0,09	5,48	3,09	4,00	13,48	2,27	-4,92	
	max	8,06	67,82	38,22	14,08	112,20	20,20	28,93	
Sulut	min	5,18	3,54	4,19	5,10	5,02	4,06	-3,13	
	max	7,56	7,03	7,18	8,84	7,49	7,59	1,37	
Sultra	min	3,15	4,13	4,74	4,93	4,77	4,12	-3,40	
	max	18,65	8,84	9,01	10,38	10,70	11,84	6,42	
Sulbar	min	4,92	5,71	4,03	5,45	5,28	4,46	-2,68	
	max	16,40	8,61	7,81	7,11	6,19	6,22	-0,40	
Tingkat Kemiskinan									
Gorontalo	min	5,85	6,05	6,05	5,70	5,57	5,45	5,59	
	max	21,05	22,43	21,17	21,85	20,33	18,87	18,57	
Sulsel	min	4,48	4,38	4,56	4,59	4,41	4,28	4,54	
	max	16,38	16,70	16,22	16,22	15,48	14,88	14,58	
Sulteng	min	7,05	7,42	7,06	6,74	14,64	6,83	6,80	
	max	18,95	18,79	18,59	18,17	18,27	18,40	17,39	
Sulut	min	4,81	5,63	5,24	5,46	5,38	5,51	5,42	
	max	15,76	15,88	14,85	14,16	13,60	13,27	12,77	
Sultra	min	5,56	5,59	5,51	5,01	4,69	4,44	4,34	
	max	16,35	16,88	17,72	18,35	17,48	17,18	17,01	
Sulbar	min	4,65	4,99	4,82	4,84	4,53	4,28	4,48	
	max	17,79	18,22	17,06	16,05	15,97	15,60	15,26	



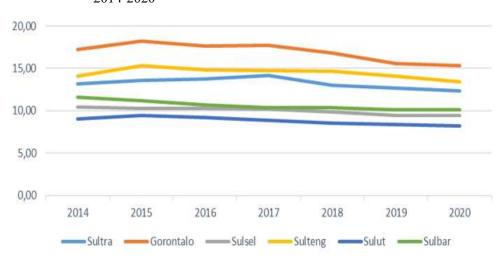


Pandemi yang mulai terjadi di akhir Maret 2020 berimbas pada beberapa lapangan usaha, utamanya yang berbasis pariwisata. Bantuan sosial yang telah digulirkan pemerintah dengan berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nyatanya belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020.

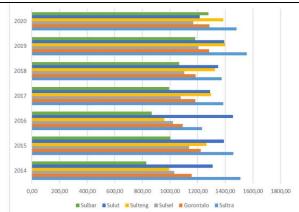
### ➤ Tingkat Kemiskinan Rata-Rata di Kawasan Nusa Tenggara

Tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di Kawasan Sulawesi terdapat di Provinsi Gorontalo, dimana tingkat kemiskinannya mencapai 18 persen pada tahun 2015. Namun tingkat kemiskinan mengalami penurunan sampai tahun 2020, dengan tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota hanya 15 persen.

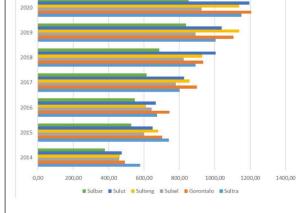
Grafik 4.1.43. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020



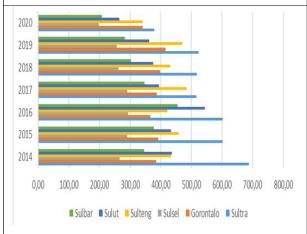
# 4.1.5.2. Input



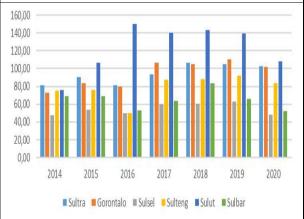
**Grafik 4.1.44.** Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020



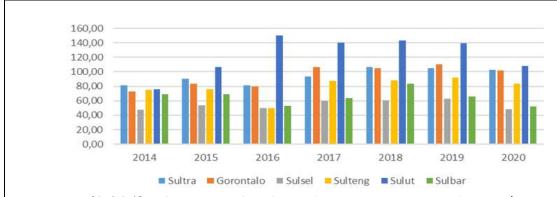
**Grafik 4.1.45.** Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020



**Grafik 4.1.46.** Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap di Kawasan Sulawesi 2014-2020



**Grafik 4.1.47.** Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020



**Grafik 4.1.48.** Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020

Tabel 4.1.22. Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi

Provinsi		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pendidik	an per	kapita						
Gorontalo	min	976,67	1072,11	140,61	992,11	998,16	1084,45	996,31
	max	1345,98	1347,74	1430,00	1348,14	1357,65	1453,06	1445,64
Sulsel	min	406,26	552,26	88,16	590,50	625,80	641,17	574,97
	max	1652,85	1871,76	1780,58	1716,80	1632,93	1836,62	1829,79
Sulteng	min	405,09	779,58	194,99	845,80	1325,92	933,56	878,70
-	max	1468,57	1831,00	1548,19	1664,42	1827,86	2022,44	2152,28
Sulut	min	688,42	909,46	76,42	778,81	920,07	894,84	702,45
	max	1963,94	2066,37	2446,73	1977,09	2447,20	2068,34	1883,31
Sultra	min	843,71	906,63	70,14	864,86	829,10	893,34	825,17
	max	2446,09	2366,09	2228,91	2289,75	2313,61	2534,31	2244,50
Sulbar	min	564,71	622,24	282,03	655,38	685,12	760,90	1066,37
	max	1270,84	1633,16	1676,29	1678,91	1721,56	1844,63	1723,99
Belanja Kesehata	n per l	kapita						
Gorontalo	min	333,77	484,19	155,36	607,23	786,83	795,87	649,98
	max	669,50	947,76	1229,92	1276,89	1088,75	1375,37	1633,44
Sulsel	min	205,42	251,10	83,91	257,76	278,87	318,18	266,26
	max	1056,77	1493,73	2168,60	2200,03	1650,13	2240,09	1909,83
Sulteng	min	304,57	389,52	188,01	383,07	929,26	699,04	643,35
	max	671,34	1006,22	1009,55	1390,95	1586,64	2049,40	1962,25
Sulut	min	242,68	291,12	141,73	324,60	326,95	503,55	452,64
	max	831,35	1083,59	1152,31	1694,76	1686,29	1750,02	2072,71
Sultra	min	235,93	321,31	90,22	378,04	488,89	494,22	523,92
	max	1138,61	1497,45	2402,05	2141,84	1759,79	1699,50	2130,38
Sulbar	min	307,15	394,64	331,94	546,20	542,27	612,62	629,97
	max	517,26	618,31	763,42	808,56	768,37	1046,72	1123,28
Belanja Ekonomi	per ka	pita						
Gorontalo	min	150,51	201,85	96,48	161,19	164,64	156,60	145,08
	max	653,46	613,15	606,74	599,82	613,86	590,32	492,56
Sulsel	min	109,81	114,60	12,87	88,98	89,42	79,84	63,37
	max	669,67	607,03	744,03	1123,69	671,87	691,89	477,77
Sulteng	min	215,74	218,14	71,38	152,23	431,18	167,01	53,01
	max	904,47	738,53	792,90	925,47	771,58	944,67	1027,48
Sulut	min	217,22	201,26	44,09	179,87	164,55	179,16	118,86
	max	661,17	684,60	1015,71	817,51	727,49	657,15	479,14
Sultra	min	240,68	193,55	53,93	187,35	153,95	131,54	97,90
	max	2004,19	1364,85	2103,92	1165,85	1142,80	1057,42	721,77
Sulbar	min	150,05	158,70	167,05	131,56	148,11	117,53	91,98
	max	561,41	496,10	690,47	533,18	414,88	385,69	269,64

Belanja Perumah Fasilitas Umum p kapita		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gorontalo	min	248,86	269,39	180,21	241,38	312,52	327,24	202,72
	max	769,41	759,98	887,52	1152,79	864,01	712,85	616,74
Sulsel	min	164,39	182,42	20,01	136,90	104,99	141,48	86,93
	max	801,59	877,44	1271,32	1430,74	1202,25	871,59	873,24
Sulteng	min	216,66	285,58	224,51	251,40	860,58	278,79	37,37
	max	612,20	1217,75	1738,04	1711,44	2103,30	2370,09	1596,93
Sulut	min	313,03	434,87	131,17	493,04	339,27	225,30	147,05
	max	1956,59	1870,89	3015,64	2227,66	1598,92	1279,42	1060,39
Sultra	min	271,20	354,63	111,40	486,23	238,84	488,27	126,30
	max	2261,78	3405,35	4618,85	4919,62	4001,62	4071,99	2113,90
Sulbar	min	200,05	262,86	426,28	355,70	318,08	315,30	187,40
	max	491,66	986,05	1287,72	1479,69	1178,59	1422,21	709,06
Belanja Perlindur	igan S	osial per k	apita					
Gorontalo	min	42,56	49,10	4,12	66,67	79,17	82,09	60,28
	max	125,44	122,21	146,44	156,18	161,03	167,55	149,84
Sulsel	min	11,56	15,50	7,50	12,44	11,86	13,01	0,00
	max	114,55	125,09	135,83	143,80	165,64	145,89	122,54
Sulteng	min	21,58	35,11	16,52	36,07	87,72	45,34	35,15
	max	229,63	152,30	108,25	196,50	131,88	139,58	174,05
Sulut	min	24,02	46,32	36,79	39,13	52,08	61,13	43,85
	max	155,32	203,61	516,82	296,30	326,24	281,00	266,64
Sultra	min	12,36	38,74	4,36	40,55	40,84	40,44	17,51
	max	221,55	243,93	239,50	172,26	202,71	187,84	203,48
Sulbar	min	19,35	21,37	20,14	7,62	10,85	21,51	19,39
	max	115,73	96,66	113,93	95,97	206,52	112,31	84,52

# 4.2. HASIL PENGUKURAN EFISIENSI

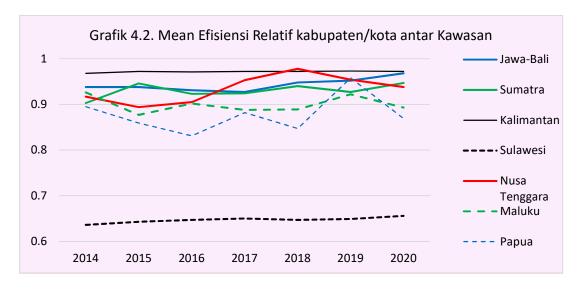
Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah untuk mengukur dan mengelompokkan (*clustering*) efisiensi belanja pemerintah *pro-poor growth* di setiap kawasan di Indonesia. Pengukuran efisiensi relatif dilakukan dengan metode Data Envelopment Analysis dengan model output oriented berdasarkan pendekatan Variable Return to Scale. Pengukuran efisiensi menggunakan input belanja pemerintah (kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan sosial dan perumahan & fasilitas umum) dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (output) di tujuh kawasan di Indonesia. Skor efisiensi adalah 0-1. Nilai E=1 menunjukkan relatif efisien, sebaliknya nilai E<1 menunjukkan tidak efisien. Pengukuran efisiensi pemerintah daerah (kabupaten dan kota) yang dilakukan pada 7 kawasan di Indonesia. Kajian efisiensi

pemerintah daerah dimulai dengan efisiensi rata-rata kabupaten/kota di setiap kawasan pada tahun 2014-2020, yang diperlihatkan dalam Tabel 4.2.1 dan Grafik 4.2.

Tabel 4.2.1. Efisiensi Relatif Rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di setiap kawasan di Indonesia tahun 2014-2020.

Kawasan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Jawa-Bali	0,938	0,938	0,931	0,927	0,948	0,952	0,968		
Sumatra	0,903	0,946	0,923	0,924	0,94	0,927	0,947		
Kalimantan	0,968	0,972	0,971	0,972	0,972	0,973	0,972		
Sulawesi	0,636	0,643	0,647	0,65	0,647	0,649	0,656		
Nusa Tenggara	0,917	0,894	0,905	0,953	0,978	0,954	0,938		
Maluku	0,926	0,877	0,902	0,888	0,889	0,922	0,893		
Papua	0,895	0,859	0,831	0,882	0,847	0,958	0,869		

Keterangan: Warna biru tebal menunjukkan tingkat efisiensi rata-rata tertinggi kawasan di Indonesia. Warna merah menunjukkan tingkat efisiensi rata-rata terendah kawasan di Indonesia



Rata-rata efisiensi relatif kabupaten/kota setiap tahun berfluktuasi di semua wilayah dari tahun 2014 hingga 2020. Hanya ada tiga wilayah yang memiliki skor rata-rata efisien lebih stabil ( $E \geq 0.9$ ) dibandingkan wilayah lainnya dari tahun 2014-2020 yaitu sumatera, jawa-bali dan kalimantan. Namun, ketiga wilayah tersebut belum mampu mencapai sekalipun efisiensi relatif (E = 1), selanjutnya dari ketiga wilayah rata-rata skor efisiensi belanja pemerintah daerah tertinggi dan paling stabil berada di wilayah Kalimantan. Hal ini menunjukkan kinerja antar pemerintah daerah di wilayah kalimantan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan paling merata dan lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Hanya wilayah Jawa-Bali yang memiliki upaya serupa dalam merealisasikan belanja untuk kesejahteraan masyarakat.

Singkatnya wilayah kalimantan menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang mampu mengalokasikan belanja, diikuti wilayah Jawa-Bali diurutan kedua.

Disisi lain, skor efisiensi rata-rata terendah untuk belanja pemerintah daerah berada di wilayah Sulawesi. Beragam tingkat efisiensi antar pemerintah daerah di wilayah sulawesi ini menggambarkan masih adanya ketimpangan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan. Dengan strategi pemerintah yang memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya alokasi belanja dapat lebih merata antar daerah, karena beberapa hal yang terjadi saat ini seperti bencana pandemi Covid-19 membuat sinergi kebijakan pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat semestinya lebih baik lagi.

Seperti yang diketahui pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang membuat guncangan di beberapa sektor khususnya ekonomi dan kesehatan. Namun jika dilihat pada Grafik 1. Rata-rata skor efisiensi antar wilayah malah menunjukkan sebaliknya. Artinya beberapa wilayah justru lebih efisien dalam mengalokasikan belanja untuk pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Selama pandemi Covid-19 belanja pemerintah diutamakan untuk sektor kesehatan dan ekonomi setelahnya. Akibatnya ada beberapa belanja pemerintah yang mengalami penurunan. Artinya ketika belanja berkurang pemerintah daerah mampu menghasilkan output yang lebih baik ketimbang saat sebelum terjadinya pengurangan anggaran.

Hal ini terjadi di empat dari tujuh wilayah yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Terkhusus di wilayah sulawesi sebagai wilayah dengan rata-rata efisien terendah dapat meningkatkan sedikit kemampuan dalam mengalokasikan belanja lebih baik sebesar 0,656 di tahun 2020 dari 0,649 di tahun 2019. Sebaliknya terjadi di 3 wilayah lainnya yaitu Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Rata-rata skor efisiensi pemerintah daerah di tiga wilayah tersebut mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Lambatnya proses adaptasi akibat pandemi Covid-19 antar pemerintah di tiga wilayah ini diduga menjadi alasan pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan belanjanya dengan lebih baik. Berikut ini akan dijelaskan lebih mendetail terkait kondisi efisiensi relatif berdasarkan Kabupaten/kota di 7 wilayah di Indonesia.

#### 4.2.1. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN DI SUMATERA

Efisiensi pemerintah daerah per kawasan dimulai dari Sumatera. Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi yang terdiri dari 154 kabupaten dan kota. Dari 154 pemerintah daerah yang diukur efisiensi relatifnya dari tahun 2014-2020 hanya sedikit sekali yang relatif efisien (dengan E = 1). Sepanjang tahun 2014-2020, Persentase pemerintah daerah yang relatif efisien sangat kecil, maksimum 17% dari 154 pemerintah daerah (27 pemerintah daerah) yang efisien (tahun 2020). Deskripsi hasil pengukuran efisiensi pemerintah daerah di Sumatera ditunjukkan oleh Tabel 4.2.2.

Tabel 4.2.2. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sumatera.

Keterangan		Kabupaten/kota								
Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah efisien	8	16	13	17	21	16	27			
rasio	5%	10%	8%	11%	14%	10%	17%			
Mean Efisien	0,903	0,946	0,923	0,924	0,94	0,927	0,947			
Paling inefisien	0.674	0.829	0.709	0.731	0.788	0.749	0.827			

Ditinjau dari rasio efisiensi antar pemerintah daerah di setiap provinsi, rasio efisiensi berkisar antara 5% sampai 17%. Artinya hanya ada rata-rata 16 pemerintah daerah yang relatif efisien, 10% dari total pemerintah daerah dari 2014-2020. Rasio yang tertinggi, yaitu sebesar 17% pada tahun 2020 (127 pemerintah daerah yang inefisien). Sebaliknya, rasio terendah di Sumatera, yaitu hanya 5% pada tahun 2014 (146 pemerintah daerah yang inefisien).

Kecilnya jumlah pemerintah daerah yang relatif efisien di setiap provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Sumatera tidak berkinerja efisien. Hal ini dibuktikan dengan nilai efisiensi relatif rata-rata yang beragam dan fluktuatif tertinggi di tahun 2020 (0,947). Rata-rata efisiensi selama 2014-2020 di sumatera setiap tahunnya hanya 0,93. Skor ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat inefisiensi rata-rata sebesar 7% setiap tahunnya untuk belanja pemerintah daerah di Sumatera. Dimana pemerintah daerah dengan skor efisiensi relatif terendah (paling inefisien) adalah Kepulauan Meranti (di Provinsi Riau) sepanjang tahun 2014-2020. Kepulauan meranti hanya mencapai efisiensi tertinggi sebesar 0,827 di tahun 2020 dan terendah di tahun 2014 sebesar 0,647. Dengan demikian, Kepulauan Meranti dinyatakan oleh DEA sebagai daerah paling inefisien di wilayah Sumatera.

Tingkat inefisiensi penggunaan ketiga input untuk mencapai output (angka harapan hidup dan lama sekolah) menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengalokasikan belanjanya untuk program dan kegiatan yang mendukung peningkatan usia harapan hidup dan peningkatan lama sekolah. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut tidak secara langsung membantu tercapainya output yang baik. Terlalu banyak pengeluaran yang hilang, sementara output yang memuaskan tidak diperoleh.

# 4.2.2. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN JAWA-BALI

Analisis efisiensi relatif pemerintah daerah dilanjutkan pada kawasan Jawa-Bali. Skor efisiensi relatif rata-rata pemerintah daerah di Jawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 4.2.3. Kondisi efisiensi relatif pemerintah daerah di Jawa-Bali lebih baik daripada Sumatera.

Tabel 4.2.3. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Jawa-Bali

	1									
Keterangan	Kabupaten/kota									
Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah efisien	27	19	16	19	25	20	40			
rasio	22%	15%	13%	15%	20%	16%	32%			
Mean Efisien	0,938	0,938	0,931	0,927	0,948	0,952	0,968			
Paling inefisien	0,746	0.758	0.779	0.781	0,831	0,831	0,838			

Berdasarkan Tabel 4.2.2, pulau Jawa memiliki 6 provinsi yang didalamnya terdapat 114 Kabupaten/kota. Bali memiliki 1 provinsi dengan 9 kabupaten/kota. Dari 123 pemerintah daerah wilayah Jawa-Bali, jumlah pemerintah daerah yang relatif efisien berkisar 16-40. Tahun 2016 rasio pemerintah daerah yang relatif efisien paling rendah, yaitu 13%, di mana terdapat 16 provinsi yang mampu mengalokasikan belanjanya secara relatif efisien. Sementara itu, rasio yang efisien tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 32% dari 123 pemerintah daerah. Artinya terdapat 40 pemda yang efisien pada tahun tersebut. Dibandingkan kawasan lain di Indonesia, di wilayah Jawa-Bali inilah terdapat pemerintah daerah yang relatif efisien terbanyak, baik dari segi jumlah pemerintah daerah maupun dari segi persentase.

Jika ditinjau dari rata-rata efisiensi relatif menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Jawa cukup bekerja secara relatif efisien dibandingkan Sumatera, walaupun posisinya masih dibawah Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan skor efisiensi relatif rata-rata yang lebih stabil, dimana skor efisiensi relatif rata-rata tertinggi dicapai di tahun 2020 (E = 0,968).

Skor efisiensi relatif rata-rata selama 2014-2020 di Jawa-Bali yaitu sebesar 0,943. Skor ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat inefisiensi rata-rata sebesar 5,7% setiap tahun. Ini berarti terjadi pemborosan belanja pemerintah secara rata-rata 5,7% daerah di Jawa-Bali per tahun. Skor efisiensi relatif terendah terjadi di Kabupaten Sampang (Provinsi Jawa Timur) selama 2014-2020. Kabupaten Sampang hanya mampu mencapai efisiensi tertinggi sebesar 0,838 di tahun 2020 dan terendah di tahun 2014 sebesar 0,746. Dengan demikian, Kabupaten Sampang dinyatakan oleh DEA sebagai daerah paling inefisien di wilayah Jawa-Bali. Dengan kata lain, terjadi pemborosan belanja pemerintah Kabupaten Sampang sebesar 16,2% (= 1 - 0,838) di tahun 2020.

## 4.2.3. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN KALIMANTAN

Berikutnya dijelaskan skor efisiensi relatif pemerintah kabupaten/kota di kawasan Kalimantan. Kalimantan terdiri dari 5 provinsi dengan 56 kabupaten/kota. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Kalimantan merupakan kawasan dengan rata-rata skor efisiensi relatif pemerintah yang paling stabil setiap tahunnya. Artinya bahwa belanja pemerintah per kapita yang digunakan pada pemerintah daerah di Kalimantan cukup baik dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat dari jumlah provinsi yang efisien setiap tahunnya tidak pernah melebihi setengah dari pemda yang ada. Misalnya di tahun 2014, hanya 12 pemerintah daerah yang efisien bahkan yang tertinggi hanya 15 pemda pada tahun 2020. Oleh sebab itu rasio yang efisien hanya berkisar 16%-27% saja. Sedikitnya pemerintah daerah yang relatif efisien tapi rata-rata skor efisiensi tinggi dan stabil menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang merata di kawasan ini. Kondisi efisiensi relatif pemerintah daerah di Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 4.2.4.

Tabel 4.2.4. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kalimantan

Vatarangan	Kabupaten/kota								
Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Jumlah efisien	12	12	9	14	13	13	15		
rasio	21%	21%	16%	25%	23%	23%	27%		
Mean Efisien	0,968	0,972	0,971	0,972	0,972	0,973	0,972		
Paling inefisien	0.892	0.904	0.903	0.903	0.901	0.899	0.905		

Sebaliknya jika dilihat rata-rata efisien di wilayah Kalimantan yang rata-rata skor efisiensinya stabil dan tidak berubah (E=0.97). Dengan kemampuan pengelolaan belanja yang baik, rata-rata skor inefisiensi belanja daerah ini rendah, hanya sekitar 3% pada tahun 2020. Selain

itu, pemerintah daerah dengan inefisiensi tertinggi silih berganti, yaitu Kabupaten Bulungan (2014), Kabupaten Landak (2015) dan kemudian Kabupaten Melawi (2016-2020). Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah di Kalimantan merata dalam mengelola belanja.

# 4.2.4 EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN SULAWESI

Efisiensi pemerintah daerah di Sulawesi akan diuraikan di bawah ini. Kawasan Sulawesi yang terdiri dari 6 provinsi ini memiliki 81 kabupaten/kota. Posisi relatif efisiensi pemerintah daerah di Sulawesi dijelaskan dalam Tabel 4.2.5. Dari 7 kawasan di Indonesia, rata-rata skor efisiensi relatif pemerintah daerah terendah berada di Sulawesi sepanjang tahun 2014-2020. Hanya sedikit sekali pemerintah daerah yang relatif efisien (dengan E = 1).

Tabel 4.2.5. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sulawesi

10001 112101 2 001111	per Brieren	Elisionsi i cinorimani Bacian di Salawesi								
17. 4	Kabupaten/kota									
Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah efisien	10	5	11	12	8	9	14			
Rasio	13%	6%	14%	15%	10%	11%	17%			
Mean Efisien	0,636	0,643	0,647	0,65	0,647	0,649	0,656			
Paling inefisien	0.55	0.563	0.573	0.568	0.578	0.588	0.597			

Ditinjau dari rasio efisiensi antar pemerintah daerah di setiap provinsi, rasio efisiensi berkisar antara 6% sampai 17%. Rasio pemerintah daerah efisien/total pemerintah daerah yang rendah ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki tingkat efisiensi yang relatif rendah. Hal ini diperkuat oleh skor rata-rata efisiensi relatif berkisar 0,63-0,65. Hal ini mendeskripsikan tingginya inefisiensi belanja pemerintah daerah, yang berkisar 35%-37%, yang berarti penggunaan belanja pemerintah daerah yang sangat tidak efisien dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi.

Rata-rata efisiensi sangat fluktuatif di wilayah Sulawesi, dibandingkan mean efisiensi tahun 2015, terjadi peningkatan mean efisiensi pada tahun 2016 dan 2017. Dari 2 tahun tersebut kembali turun pada tahun 2018-2019, lalu meningkat pada tahun 2020. Bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 diduga menjadi penyebab kemunduran alokasi belanja pemerintah. Bagaimana tidak, akibat bencana ini dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana sebesar Rp36,94 triliun.

Dampak kerugian dan kerusakan di sektor permukiman adalah paling besar karena luas dan masifnya dampak bencana. (https://bnpb.go.id. Diakses pada 2 Agustus 2022).

Penurunan tingkat efisiensi pemerintah daerah yang paling inefisien terjadi di Kabupaten Boalemo. Dari kisaran 67-76 pemerintah daerah yang inefisien Kabupaten Boalemo dengan skor rata-rata efisiensi terendah (0,57), pada tahun 2014-2020. Kabupaten Boalemo hanya mencapai efisiensi tertinggi sebesar 0,597 di tahun 2020 dan terendah di tahun 2014 sebesar 0,55. Dengan demikian, Sulawesi termasuk wilayah dengan tingkat inefisiensi penggunaan belanja tertinggi. Menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengalokasikan belanjanya untuk program dan kegiatan yang mendukung. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut tidak secara langsung membantu tercapainya output yang baik. Terlalu banyak pengeluaran yang hilang, sementara output yang memuaskan tidak diperoleh.

## 4.2.5. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN NUSA TENGGARA

Nusa Tenggara menjadi kawasan selanjutnya yang dianalisis. Kawasan Nusa Tenggara memiliki 2 provinsi, yang terdiri dari dan 32 kabupaten/kota. Dari 32 pemerintah daerah yang diukur efisiensi relatifnya dari tahun 2014-2020, jumlah terendah pemerintah daerah yang efisien relarif adalah 7 pemerintah daerah (2015) dan jumlah tertinggi adalah 13 pemerintah daerah (2020). Informasi ini disajikan di Tabel 4.2.6.

Tabel 4.2.6. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara

W	Kabupaten/kota									
Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah efisien	8	7	9	11	9	10	13			
Rasio	25%	22%	28%	34%	28%	31%	41%			
Mean Efisien	0,917	0,894	0,905	0,953	0,978	0,954	0,938			
Paling inefisien	0.749	0.707	0.704	0.885	0.819	0.859	0.729			

Ditinjau dari rasio jumlah pemerintah daerah yang relatif efisien/total pemerintah daerah, rasionya berkisar 22% - 41%. Artinya cukup banyak pemerintah daerah yang mampu menjadi relatif efisien di Nusa Tenggara, bahkan rasio ini mencapai 41% pada tahun 2020. Berdasarkan informasi ini, dapat dikatakan bahwa Nusa Tenggara menjadi kawasan dengan persentase pemerintah daerah yang relatif efisien terbesar di Indonesia.

Rasio efisien yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki mean efisiensi yang tinggi namun belum mencapai efisiensi secara relatif. Hal ini dipertegas oleh fakta bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki skor rata-rata efisiensi antara 0,89 sampai 0,97. Faktanya, pemerintah daerah di Nusa Tenggara memiliki tingkat inefisiensi belanja berkisar 3%-11%. Hal ini menunjukkan dalam kondisi yang maksimal untuk penggunaan belanja ternyata Nusa Tenggara dapat menjadi wilayah yang lebih baik dibandingkan Sumatera (Inefisiensi 7%) dan Jawa (inefisiensi 5,7%).

Namun perlu diperhatikan untuk mean efisiensi sangat fluktuatif di wilayah Nusa Tenggara, tapi ada kecenderungan menurun. Tahun terbaik untuk mean efisiensi di wilayah ini yaitu tahun 2018 dimana mean efisiensi sebesar 0,97, namun setelah itu terus terjadi penurunan mean efisiensi pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menjadi evaluasi bagi wilayah Nusa Tengara karena berbanding terbalik dengan beberapa wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan bahkan Sulawesi yang justru meningkat pada tahun 2020 (terjadinya Pandemi Covid-19).

Dimana pemerintah daerah dengan skor efisiensi relatif terendah (paling inefisien) adalah Kabupaten Sumba Tengah dan Lombok Utara. Kabupaten Sumba Tengah mendominasi sebagai daerah yang paling inefisien dalam penggunaan belanja kecuali tahun 2018, dimana Lombok Utara menjadi daerah paling inefisien (0,81). Kabupaten Sumba Tengah hanya mencapai efisiensi tertinggi sebesar 0,88 di tahun 2017 dan terendah di tahun 2016 sebesar 0,70. Dengan demikian, Kabupaten Sumba Tengah dinyatakan oleh DEA sebagai daerah paling inefisien di wilayah Nusa Tenggara.

## 4.2.6. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN MALUKU

Kawasan yang dianalisis berikutnya ialah kawasan Maluku yang terdiri dari 2 provinsi dengan 21 kabupaten/kota. Dari 21 pemerintah daerah tersebut, hanya berkisar 4-7 pemerintah daerah yang relatif efisien di Maluku. Ditinjau dari rasio jumlah pemerintah daerah yang relatif efisien terhadap total pemerintah daerah di Maluku, terlihat rasio ini berkisar antara 20% sampai 25%. Artinya rata-rata hanya ada 5 pemerintah daerah yang relatif efisien. Rasio yang tertinggi, yaitu sebesar 35% pada tahun 2016. Sebaliknya, rasio terendah yaitu hanya 20% pada tahun 2015 dan 2019. Rasio efisien yang lebih baik bila dibandingkan dengan wilayah Sulawesi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki mean efisiensi yang lebih baik

pula. Hal ini dipertegas oleh fakta bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki skor ratarata efisiensi antara 0,87 sampai 0,93. Faktanya, pemerintah daerah di Sulawesi memiliki tingkat inefisiensi belanja berkisar 7%-13%. Hal ini menunjukkan penggunaan belanja yang tidak efisien namun lebih baik dari beberapa wilayah lainnya. Penjelasan tingkat efisiensi di kawasan ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.7.

Tabel 4.2.7. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Maluku

Votorongon	Kabupaten/kota									
Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Efisien	5	4	7	5	5	4	5			
rasio	25%	20%	35%	25%	25%	20%	25%			
Mean efisien	0,926	0,877	0,902	0,888	0,889	0,922	0,893			
Paling inefisien	0.831	0.705	0.719	0.721	0.72	0.793	0.736			

Rata-rata efisiensi juga fluktuatif di wilayah Maluku, tahun terbaik untuk mean efisiensi di wilayah ini yaitu tahun 2014 dimana mean efisiensi sebesar 0,92, namun setelah itu terus terjadi penurunan mean efisiensi terendah pada setelahnya yaitu tahun 2015 sebesar 0,87. Hal ini menjadi evaluasi bagi wilayah Maluku dalam mengalokasikan belanjanya untuk program dan kegiatan yang mendukung dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dilihat skor efisiensi terendah setiap tahunnya, diketahui ada beberapa kabupaten dengan tingkat efisiensi terendah. Dengan kata lain, kabupaten yang paling inefisien di Maluku silih berganti, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2014, Seram Bagian Timur di tahun 2019 dan Maluku Barat Daya di tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2020. Kabupaten Halmahera Tengah hanya mencapai efisiensi sebesar 0,83, Seram Bagian Timur (0,79) dan Maluku Barat Daya hanya mencapai efisiensi tertinggi di tahun 2020 sebesar 0,73. Dengan demikian, Kabupaten Maluku Barat Daya dinyatakan oleh DEA sebagai daerah paling mendominasi dari segi inefisiensi di wilayah Maluku.

## 4.2.7. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN PAPUA

Kawasan terakhir yang dianalisis ialah Papua, yang terdiri dari 2 provinsi dengan 42 kabupaten/kota. Tabel 4.2.8 menjelaskan kondisi efisiensi 42 pemerintah daerah di Papua. Selama 2014-2020, pemerintah daerah yang relatif efisien berjumlah 8-11 pemerintah daerah, atau berkisar antara 17% sampai 26% dari 42 pemerintah daerah. Rendahnya persentase pemerintah daerah yang

relatif efisien menjadikan kawasan Papua sebagai salah satu kawasan dengan inefisiensi tinggi. Selain itu, pemerintah daerah belum dapat menjaga posisi efisiensinya dengan stabil karena ratarata skor efisiensi di kawasan ini bervariatif, berkisar 0,831-0,958

Tabel 4.2.8. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Papua

Vatarangan	Kabupaten/kota								
Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Efisien	11	9	9	9	8	7	9		
rasio	26%	21%	21%	21%	19%	17%	21%		
Mean efisien	0,895	0,859	0,831	0,882	0,847	0,958	0,869		
Paling inefisien	0.682	0.683	0.661	0.668	0.635	0.88	0.66		

Dari 42 pemerintah daerah yang ada di Papua, ada beberapa kabupaten yang secara bergantian menduduki posisi sebagai pemerintah daerah dengan skor efisiensi relatif terendah. Kabupaten dengan skor efisiensi terendah (paling inefisien) tersebut adalah Kabupaten Teluk Bintuni (tahun 2014), Supiori (tahun 2015), Lanny Jaya (tahun 2016), Intan Jaya (tahun 2017), Deiyai (tahun 2018), Boven Digoel (tahun 2019) dan Deiyai (tahun 2020). Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah di wilayah Papua khususnya daerah paling inefisien untuk kembali pada kinerja terbaik dan terus meningkatkan dalam penggunaan belanjanya untuk program dan kegiatan yang mendukung dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua sehingga dapat mencapai skor efisiensi (E=1).

# 4.3. PEMBAHASAN

# 4.3.1. KLUSTERISASI KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN EFISIENSI

Dari penjelasan skor efisiensi sebelumnya diketahui ada beberapa kelompok pemerintah daerah berdasarkan kemampuannya dalam mempertahankan posisi sebagai pemerintah yang efisien di kawasan masing-masing. Untuk itu, penelitian ini mengelompokkan (clustering) pemerintah daerah berdasarkan skor efisiensinya selama tahun 2014-2020, yang terdiri dari 4 kluster, yaitu:

- a. Kluster 1 (tetap efisien setiap tahun),
- b. Kluster 2 (skor efisiensi berfluktuasi tapi pernah relatif efisien di tahun tertentu),
- c. Kluster 3 (tidak pernah efisien namun skor efisiensi terus meningkat setiap tahunnya),
- d. Kluster 4 (tidak pernah efisien bahkan skor efisiensi terus menurun).

Jumlah pemerintah kabupaten/kota di setiap kluster pemerintah daerah pada tujuh kawasan dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.

Tabel 4.3.1. Jumlah Pemerintah Kabupaten/kota di setiap Kluster selama 2014-2020

Kawasan	Klus	ter 1	Klus	Kluster 2		Kluster 3		ster 4
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	0	0	51	33,12	94	61,04	9	5,84
Jawa-Bali	4	3,28	52	42,62	63	51,64	3	2,46
Kalimantan	3	5,36	23	41,07	19	33,93	11	19,64
Sulawesi	3	3,70	26	32,10	45	55,56	7	8,64
Nusa Tenggara	3	9,38	10	31,25	19	59,38	0	-
Maluku	3	14,29	6	28,57	6	28,57	6	28,57
Papua	1	2,38	13	30,95	13	30,95	15	35,71

Dari tujuh kawasan, hanya di kawasan Sumatera tidak ada kluster 1, tidak ada satupun pemerintah daerah yang bisa selalu relatif efisien setiap tahun selama 2014-2020. Sebanyak 51 pemerintah daerah di kawasan ini pernah menjadi relatif efisien pada satu atau beberapa tahun. Sementara itu, di lima kawasan (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara), ternyata mayoritas pemerintah daerah berada pada kluster 3, yaitu tidak pernah efisien namun tingat efisiensinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Kawasan Maluku, jumlah pemerintah daerah di kluster 2, 3 dan 4 sama besar (28,57%). Sedangkan di Kawasan Papua, kluster dengan jumlah terbesar adalah kluster 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di kawasan ini semakin tidak efisien di tahun-tahun terakhir.

Selanjutnya diuraikan pemerintah daerah yang berada pada kluster 1, yang bisa selalu relatif efisien baik sebelum pandemi Covid-19 (2014-2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020). Di Kawasan Sumatera, tidak ada satupun pemerintah daerah di dalam Kluster 1. Di kawasan Jawa-Bali terdapat empat pemerintah daerah di kluster 1, yaitu Subang, Depok, Tangerang Selatan dan Denpasar. Di Kawasan Kalimantan, 3 pemerintah daerah di dalam kluster 1 adalah Balikpapan, Banjar, dan Banjarmasin. Sedangkan tiga pemerintah daerah yang berada di dalam kluster 1 di Sulawesi terdiri dari Morowali, Bone dan Makasar. Demikian juga di kawasan Nusa Tenggara, terdapat 3 pemerintah daerah yang ada di kluster 1, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Mataram. Selanjutnya di kawasan Maluku, ada tiga pemerintah daerah di kluster 1. Ketiganya

adalah Ambon, Halmahera Utara, Ternate. Terakhir, di Kawasan Papua, hanya ada satu pemerintah daerah yang termasuk di dalam kluster 1, yaitu Jayapura.

Dari penjelasan kluster efisiensi pemerintah daerah pada tujuh kawasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 20 pemerintah daerah yang selalu efisien selama 2014-2020, yang berada dalam kluster 1. Untuk itu, perlu dianalisis bagaimana 20 pemerintah daerah ini bisa selalu efisien baik sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2014-2019) maupun saat pandemi Covid-19 (2020). Perlu dikaji bagaimana pemerintah daerah yang selalu efisien ini menggunakan belanja untuk menurunkan kemiskinan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi ini dijelaskan dengan bantuan bubble chart sebagai berikut.

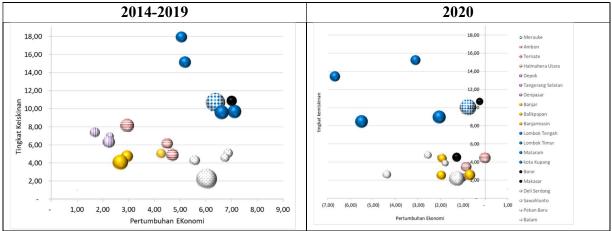


Diagram 4.3.1. Kaitan Belanja Pemerintah dengan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di 20 Pemerintah Daerah di Indonesia

Diagram 4.3.1 menunjukkan bubble chart yang menjelaskan kondisi 20 pemerintah daerah yang selalu relatif efisien selama 2014–2019 dan 2020 di tujuh kawasan di Indonesia. Angkaangka tersebut menjelaskan secara lebih rinci dan menegaskan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masing-masing pemerintah daerah. Pemda dalam satu wilayah memiliki warna dan motif yang sama. Gelembung dengan kotak biru adalah pemerintah daerah di Papua. Gelembung dengan garis horizontal merah adalah pemerintah daerah di Maluku. Gelembung dengan garis vertikal ungu adalah pemerintah daerah di Jawa-Bali. Gelembung kuning adalah pemerintah daerah di Kalimantan. Gelembung biru adalah pemerintah daerah di Nusa Tenggara. Gelembung hitam adalah pemerintah daerah di Sulawesi. Gelembung putih dengan bintik hitam adalah pemerintah daerah di Sumatera.

Ukuran gelembung menunjukkan ukuran total dari lima jenis pengeluaran per kapita (kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan sosial dan perumahan & fasilitas umum). Semakin besar pengeluaran per kapita, semakin besar ukuran gelembung/bubble.

## 4.3.2 PEMERINTAH DAERAH YANG SELALU MENJADI PEER

Posisi dan klusterisasi pemerintah daerah berdasarkan tingkat efisiensinya di setiap kawasan sudah dideskripsikan dan dianalisis. Telah diketahui pemerintah daerah yang selalu efisien serta bagaimana capaian outputnya selama 2014-2019 dan 2020.

Selanjutnya akan diuraikan klasifikasi pemerintah daerah yang selalu efisien tersebut dan juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak efisien. Walaupun terdapat 20 pemerintah daerah yang selalu efisien, ternyata tidak semua pemerintah daerah tersebut bisa menjadi rujukan atau contoh bagi pemerintah daerah yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan pengggunaan input dan output yang dihasilkan pemerintah yang efisien tersebut tidak memiliki kemiripan dengan pemerintah daerah yang tidak efisien. Dari 20 pemerintah daerah yang selalu efisien, hanya 12 pemerintah daerah yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak efisien. 12 pemerintah daerah ini ditampilkan di Tabel 4.3.2.

Tabel 4.3.2. Pemerintah Kabupaten/kota yang selalu menjadi Rujukan selama 2014-2020.

Kawasan	Kabupaten/kota
Sumatra	-
Jawa Bali	Depok, Tangerang Selatan, Denpasar
Kalimantan	Palangkaraya, Balikpapan
Sulawesi	-
Nusa Tenggara	Lombok Tengah, Lombok timur, Mataram, Kota Kupang
Maluku	Ambon, Ternate
Papua	Merauke

Dari 20 pemerintah daerah yang selalu relatif efisien, tidak semuanya telah menjadi rujukan (benchmarking). Hanya 12 pemerintah daerah efisien yang selalu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak efisien. 12 pemerintah daerah ini berada di 5 wilayah. Tidak ada satu pun pemerintah daerah yang menjadi peer di wilayah Sumatera dan Sulawesi sepanjang tahun 2014–2019 dan 2020. 12 pemerintah daerah dari 5 wilayah yang menjadi peer ini dapat menjadi rujukan bagi masing-masing pemda di wilayahnya. misalnya, di Kalimantan, pemerintah daerah yang relatif tidak efisien dapat merujuk kepada pemerintah kota Palangkaraya dan Balikpapan sebagai

tolak ukur untuk meningkatkan efisiensi relatifnya di masa mendatang. Demikian juga dengan Kawasan Nusa Tenggara, pemerintah daerah yang relatif tidak efisien dapat melakukan benchmark dengan peer mereka masing-masing: Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram, dan Kota Kupang.

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. KESIMPULAN

Tahun pertama penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada tujuh kawasan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

- 1. Pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi rata-rata tertinggi berada di Kawasan Kalimantan, sebaliknya, yang terendah terdapat di Kawasan Sulawesi.
- 2. Berdasarkan klusterisasi efisiensi, terdapat 20 pemerintah daerah yang selalu efisien selama periode penelitian di tujuh kawasan di Indonesia. selanjutnya terdapat 12 pemerintah daerah yang selalu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak efisien.

## **5.2. SARAN**

- 1. Pemerintah daerah yang selalu efisien dan menjadi rujukan di tujuh kawasan dapat mempertahankan kondisi perekonomiannya supaya tingkat kemiskinannya tidak meningkat sekaligus terjadi pertumbuhan ekonomi.
- 2. Pemerintah daerah yang tidak efisien diharapkan dapat belajar mengalokasikan belanja kepada pemerintah daerah yang efisien dan sekaligus menjadi rujukannya.
- 3. Pemerintah daerah di Sulawesi diharapkan dapat bekerja dengan lebih efisien agar tidak efisiensi belanjanya meningkat.

#### REFERENSI

- Dufrechou PA. The efficiency of public education spending in Latin America: A comparison to high income countries. International Journal Educational Development [Internet]. 2016;49:188–203. Available from: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.03.005">http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.03.005</a>
- 2. Nassar H, Sakr H, Ezzat A, Fikry P. Technical efficiency of health-care systems in selected middle-income countries: an empirical investigation. Review of Economics and Political Science. 2020;5(4):267–87.
- 3. Brini R, Jemmali H. Public spending efficiency, governance, political and economic policies: Is there a substantial causal relation? Evidence from selected MENA countries. International Journal of Economics and Financial Management. Vol. 2016;1(January):24–34.
- 4. Sharif N, Chandra K, Mansoor A, Sinha KB. A comparative analysis of research and development spending and total factor productivity growth in Hong Kong, Shenzhen, Singapore. Structural Change and Economic Dynamics [Internet]. 2021;57:108–20. Available from: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.02.004
- 5. Fonayet F., Belzunegui Eraso Á, De Andrés Sánchez J. Efficiency of Social Expenditure Levels in Reducing Poverty Risk in the EU-28. Poverty and Public Policy [Internet]. 2020;12(1):43–62. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/pop4.267
- 6. Ebunoluwa OO, Yusuf WA. "Effects of Economic Growth on Poverty Reduction In Nigeria." IOSR Journal of Economics and Finance. 2018;9(5):25–9.
- 7. Loría E. Poverty trap in Mexico, 1992-2016. International Journal of Development Issues. 2020;19(3):277–301.
- 8. Cyrek M. Government social spending in the EU countries: efficiency in poverty and income inequality reduction. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2019;14(3):405–24.
- 9. Albassam BA. A model for assessing the efficiency of government expenditure. Cogent Economics & Finance. 2020;8(1):1–13.
- 10. Ouertani MN, Naifar N, Ben Haddad H. Assessing government spending efficiency and explaining inefficiency scores: DEA-bootstrap analysis in the case of Saudi Arabia. Cogent Economics & Finance [Internet]. 2018;6(1):1–16. Available from: https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1493666
- 11. Rambe RA. Implications of Regional Split in Local Government Efficiency: Evidence from North Sumatra, Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 2020;12(32):159–75.
- 12. Guo X, Zhang J, Xu Z, Cong X, Zhu Z. The efficiency of provincial government health care expenditure after China's new health care reform. PLOS One. 2021;16(10 October):1–17.
- 13. Olanubi SO, Osode OE. The efficiency of government spending on health: A comparison of different administrations in Nigeria. Journal of Policy Modelling [Internet]. 2017;39(1):79–98. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2016.12.002

- 14. Samut PK, Cafri R. Analysis of the Efficiency Determinants of Health Systems in OECD Countries by DEA and Panel Tobit. Social Indicators Reseach. 2016;129(1):113–32.
- 15. Wiesel I, Liu F, Buckle C. Locational disadvantage and the spatial distribution of government expenditure on urban infrastructure and services in metropolitan Sydney (1988–2015). Geographycal Research. 2018;56(3):285–97.
- 16. Aderogba BA, Adegboye AA. Assessing the Impact of Road Infrastructure on Poverty Reduction in Developing Economies: The Case of Nigeria. Modern Economy. 2019;10(12):2430–49.
- 17. Jimenez-Castilla T, Bolivar LM, Segrera-Castilla M. Infrastructure and rurality: Challenges for sustainable economic development in Latin America. Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology. 2020;(c):1–8.
- 18. Ernawati E, Tajuddin T, Nur S. Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. Economies. 2021;9(4).
- 19. Sekiguchi S. An Analysis of the Efficiency of Local Government Expenditure and the Minimum Efficient Scale in Vietnam. Urban Science. 2019;3(3):77.
- 20. Ambarkhane D, Singh AS, Venkataramani B. Measuring efficiency of Indian states for reducing poverty using data envelopment analysis. Poverty and Public Policy. 2020;12(4):357–85.
- 21. Rakotondramaro H, Andriamasy L. Multivariate Granger Causality among tourism, poverty and growth in Madagascar. Tourism Management Perspectives [Internet]. 2016;20:109–11. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2016.08.005
- 22. Nakabashi L. Poverty and economic development: Evidence for the Brazilian states. EconomiA [Internet]. 2018;19(3):445–58. Available from: https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.11.002
- 23. Garza-Rodriguez J. Poverty and economic growth in Mexico. Social Sciences. 2018;7(10).
- 24. Erlando A, Riyanto FD, Masakazu S. Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. Heliyon [Internet]. 2020;6(10):e05235. Available from: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235
- 25. Jayadi D., Bata A. Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2012. Modus. 2016;28(1):87099.
- 26. Conglai F, Chaofeng X. Pro-poor growth and the realization of common prosperity of socialism with Chinese characteristics. China Political Economy. 2018;1(2):207–18.
- 27. Rashid Khan HU, Nassani AA, Aldakhil AM, Qazi Abro MM, Islam T, Zaman K. Pro-poor growth and sustainable development framework: Evidence from two step GMM estimator. Journal of Cleaner Production [Internet]. 2019;206:767–84. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.195
- 28. Fufa GB. Determinants of Pro-Poor Growth and Its Impacts on Income Share: Evidence from Ethiopian Time Series Data. The Scientific World Journal. 2021;2021.

- 29. Gordon J, Zhao S, Gretton P. On Productivity: Concepts and Measurement. Productivity Commission Staff Research Note [Internet]. 2015;(February):1–21. Available from: http://www.itsanhonour.gov.au
- 30. Vaslavskiy Y, Vaslavskaya I. Infrastructure Public–Private Partnership Projects: Budget Consolidation Policy in Russia and Government Expenditures' Efficiency Increase. Modelling Economic Growth in Contemporay Russia. 2019;203–32.
- 31. Zavaleta J, Cruz M. Productivity and effective demand: Assessing the disaggregate public spending. Investigation Economica. 2019;78(309):107–32.
- 32. Sakamoto T. Social investment policy, economic growth, and welfare states: Channels of pro-growth effects of policy. Social Forces. 2020;99(2):590–615.
- 33. Tang J, Wang W. Technological frontier, technical efficiency and the post-2000 productivity slowdown in Canada. Structural Change and Economic Dynamics. 2020;55:12–25.
- 34. Christie TAL, Rioja FK. Fiscal position and the financing of productive government expenditures: an application to Latin America. Journal of Economic Policy Reform. 2017;20(2):113–35.
- 35. Aslam Q. An analysis of public sector spending on education in Pakistan and its impact on the productivity and employability of Pakistan's human resource. Revista Eletrônica Gestão & Sociedade. 2019;13(35):2992–3010.
- 36. Xenos P, Yfantopoulos J, Nektarios M, Polyzos N, Tinios P, Constantopoulos A. Efficiency and productivity assessment of public hospitals in Greece during the crisis period 2009-2012. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2017;15(1):1–12.
- 37. Ozbugday FC, Tirgil A, Kose EG. Efficiency changes in long-term care in OECD countries: A non-parametric Malmquist Index approach. Socio-Economic Planning Sciences [Internet]. 2020;70(January 2019):100733. Available from: https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100733
- 38. Taruno HT. Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018. The Indonesian Journal of Planning and Development. 2019;4(2):49–56.
- 39. Purmini, Rambe RA. Labor and Government Policies on Poverty Reduction in Sumatera Island, Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2021;19(June):61–74.
- 40. Babatunde SA. Government spending on infrastructure and economic growth in Nigeria. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [Internet]. 2018;31(1):997–1014. Available from: http://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1436453
- 41. Alper FO, Demiral M. Public Social Expenditures and Economic Growth: Evidence from Selected OECD Countries. Research in World Economy. 2016;7(2):44–51.
- 42. Adeosun OA, Tabash MI. Pro-poor and inclusive growth in West Africa. African Journal of Economic and Management Studies. 2021; https://doi.org/10.1108/AJEMS-08-2021-0359
- 43. Wandeda DO, Masai W, Nyandemo SM. The Efficiency of Public Spending in Sub-Saharan Africa. European Scientific Journal. 2021;17(19):173–93.

- 44. Booth A. Splitting, splitting and splitting again A brief history of the development of regional government in Indonesia since independence. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia. 2011;167(1):31–59.
- 45. Wibowo K, Muljarijadi B. Reformasi Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Belitung TImur [Internet]. 2014. Available from: http://www.academia.edu/19226920/Reformulasi\_pembentukan\_Daerah\_Otonomu\_Baru\_Studi\_K asus\_Kapasitas\_Fiskal\_di\_Kabupaten\_Belitung\_Timur\_Propinsi\_Bangka\_Belitung
- 46. Rambe RA. Analisis efisiensi belanja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian IPM provinsi di Indonesia. Padjadjaran University; 2018. Dissertation
- 47. Rambe RA, Wibowo K, Febriani RE, Septriani S. Assessing Local Government Efficiency: Evidence from Sumatra, Indonesia. Applied Economics Journal. 2020;27(2):20–44.
- 48. Rambe RA. Inefisiensi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia: Pendekatan DEA dan Regresi Logit. Indonesian Treasury Review Journal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. 2020;5(4):311–24.
- 49. Antonelli M., De Bonis V. The efficiency of social public expenditure in European countries: a two-stage analysis. Applied Economics [Internet]. 2018;51(1):47–60. Available from: https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1489522
- 50. Mohanty RK, Bhanumurthy NR. Assessing public expenditure efficiency at the subnational level in India: Does governance matter? Journal of Public Affairs [Internet]. 2020;21(2):1–14. Available from: doi: 10.1002/pa.2173
- 51. Moreno-Enguix MDR, Bayona LVL. Factors Affecting Public Expenditure Efficiency in Developed Countries. Politics & Policy [Internet]. 2017;45(1):105–43. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/polp.12139/abstracthttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.http://onlinelibrary.wiley.com/
- 52. Badun M, Pribičević V, Deskar-Škrbić M. Government size and efficiency as constraints to economic growth: Comparing Croatia with other European countries. Post-Communist Economies. 2014;26(3):297–323.
- 53. Afonso A, Venâncio A. Local territorial reform and regional spending efficiency. Local Government Studies [Internet]. 2020;46(6):888–910. Available from: https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1690995
- 54. Balaguer-Coll MT, Brun-Martos MI, Márquez-Ramos L, Prior D. Local government efficiency: determinants and spatial interdependence. Applied Economics [Internet]. 2019;51(14):1478–94. Available from: https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1527458
- 55. Agasisti T, Dal Bianco A, Griffini M. The public sector efficiency in Italy: The case of Lombardy municipalities in the provision of the essential public services. Economica Pubblica. 2016;(1):59–84.
- 56. Boetti L, Piacenza M, Turati G. Decentralization and Local Governments' Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending Efficiency? FinanzArchiv / Public Finance Analysis. 2012;68(3):269–302.

- 57. Porcelli F. Electoral Accountability and Local Government Efficiency Quasi- Experimental Evidence From the Italian Governance Health Care Sector Reforms. Economic of Governance. 2014;15(3):221–51.
- 58. Deng Z, Zhang J, Feng Y, Wang J. Factors Influencing the Supply Efficiency of Basic Service at County Level. Asian Agricultural Research. 2013;5 (9):53–9.
- 59. D'Inverno G, Carosi L, Ravagli L. Global public spending efficiency in Tuscan municipalities. Socio-Economic Planning Sciences [Internet]. 2018;61:102–13. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.seps.2017.01.006
- 60. Coelli TJ, Rao D. P, O"Donnel CJ, Battese GE. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 2nd ed. Springer; 2005.
- 61. Ou Z, Zeng F, Zhan X. Does Public Spending Structure Affect the Efficiency of Spending? Evidence from a Panel Tobit Model for Chinese Provinces. International Journal of Mangement, Economics and Social Sciences. 2020;9(3):206–23.
- 62. Shin DJ, Cha BS, Kim BHS. Efficient Expenditure Allocation for Sustainable Public Services?—
  Comparative Cases of Korea and OECD Countries. *Sustainability*. 2020;12(22), 9501; <a href="https://doi.org/10.3390/su12229501">https://doi.org/10.3390/su12229501</a>.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# UNIVERSITAS BENGKULU

# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon / Faksimile : (0736) 342584

Laman: http://www.unib.ac.id. Email: lppm@unib.ac.id

# SURAT KETERANGAN

Nomor: 5996/UN30.15/PP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc.

NIP

: 196306251987031002

Jabatan

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

NO	Nama	NIDN/NPM	Jabatan	Fakultas/ Institusi
1	Roosemarina Anggraini Rambe	0029087106	Ketua Peneliti	FEB
2	Ratu Eva Febriani	0003028401	Anggota	FEB
3	Muhammad Havizd	C1A019019	Pembantu Peneliti/ Mahasiswa	FEB
4	Jormarito Elisabet Siahaan	C1A019039	Pembantu Peneliti/ Mahasiswa	FEB

Benar-benar telah melaksanakan/ mengadakan Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) dengan judul: "EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH PROPOOR GROWTH: KLUSTERISASI KAWASAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA."

Jangka Waktu Penelitian

8 (delapan) bulan

Tahun Pelaksanaan

Tahun 2022

Sumber Dana

: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RI. Tahun Anggaran 2022

Jumlah Dana

: Rp. 188.100.000,-

Penelitian tersebut telah diusulkan, dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan untuk keperluan yang bersangkutan sebagai tenaga edukatif.

Bengkulu, 29 Desember 2022

Ketua,

Hery Suhartoyo

NIP 196306251987031002